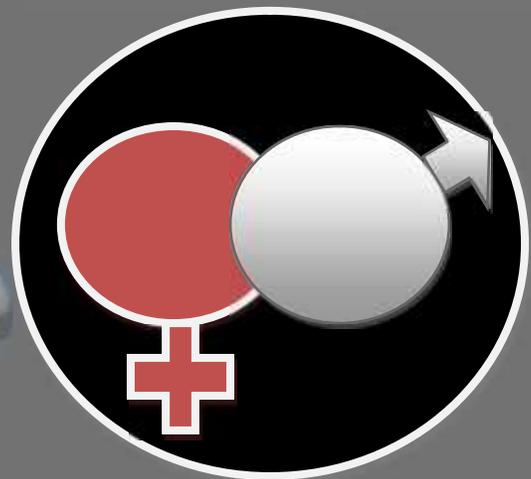


2019



**PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG**

**PROFIL GENDER DATA TERPILAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**





**PENYUSUN PROFIL GENDER TERPILAH
BULELENG**

KABUPATEN

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penyusun : Dr. I Gde Made Metera

Mengetahui
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,

Singaraja, Desember 2019
Penyusun,

Made Arya Sukerta, SH, MH
NIP. 19641217198503 1 007

Dr. I Gde Made Metera, M.Si.
NIP. 19600506198703 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan “Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng Tahun 2019” sesuai rencana. Secara umum penyusunan buku Profil Gender ini bertujuan untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekokomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Profil Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukan isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud.

Manfaat khusus dari penyusunan buku Profil Gender Kabupaten Buleleng ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/program/kegiatan serta anggaran pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penyusun dan semua pihak atas bantuan dan kerja sama yang baik dalam penyusunan Profil ini, sehingga “Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng Tahun 2019” dapat diselesaikan sesuai rencana.

Singaraja, Desember 2019
Penyusun “Profil Gender Terpilah Kabupaten
Buleleng Tahun 2019”
Penanggungjawab,

Made Arya Sukerta, SH, MH
NIP. 19641217198503 1 007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PENYUSUN	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar belakang	I-1
	1.2 Tujuan	I-2
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG	
	2.1 Kondisi Geografis	II-1
	2.2 Kondisi Demografis	II-2
	2.3 Visi dan Misi	II-7
	2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	II-8
	2.5 Prioritas Pembangunan	II-15
BAB III	GENDER, KONSEP DAN TEORI	III-1
	3.1 Gender dan Jenis kelamin	III-1
	3.2 Kesetaraan dan Keadilan Gender	III-6
	3.3 Pengarusutamaan Gender	III-10
BAB IV	GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN	IV-1
	4.1 Angka Partisipasi Murni	IV-1
	4.2 Angka Partisipasi Kasar	IV-5
	4.3 Jumlah Siswa	IV-8
	4.4 Siswa Putus Sekolah	IV-10
	4.5 Jumlah Guru	IV-13
	4.6 Guru Bersertifikat Pendidik	IV-15
BAB V	GENDER DALAM BIDANG KESEHATAN	V-1
	5.1 Gender Pada Pemberian ASI Bayi	V-1
	5.2 Gender Pada Pelayanan Kesehatan Balita	V-2
	5.3 Peserta Keluarga Berencana Aktif	V-4
	5.4 Gender Pada Tenaga Medis	V-4
BAB VI	GENDER DALAM KEGIATAN EKONOMI	VI-1
	6.1 Mata Pencaharian Penduduk	VI-1
	6.2 Kepemilikan Usaha	VI-2
	6.3 Tenaga Kerja Indonesia	VI-4



Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng

BAB VII	GENDER DALAM BIDANG PEMERINTAHAN	VII-1
	7.1 Gender Pada Legislatif dan Penyelenggara Pemilu	VII-1
	7.2 Gender Pada ASN di Kabupaten Buleleng	VII-2
	7.3 Gender Pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng	VII-3
BAB VIII	ISU GENDER LAIN	VIII-1
BAB 1X	PENUTUP	IX-1
	9.1 Simpulan	IX-1
	9.2 Rekomendasi	IX-3

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Profil gender yang memuat data gender terpilah sangat penting. Data gender terpilah itu dimanfaatkan untuk analisis gender sehingga bisa diperoleh isu-isu gender berupa ketimpangan atau ketidakadilan gender pada berbagai bidang sesuai dengan analisis atas data gender terpilah. Berdasarkan isu-isu gender hasil analisis itu dapat dibuat strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan atau keadilan gender.

Perhatian dunia terhadap isu gender nampaknya cukup serius, terbukti dengan dimasukkannya persoalan gender ini sebagai salah satu bagian dari delapan kesepakatan *Millenium Development Goals (SDGs)* yang kemudian berlanjut ke *sustainable Development Goals (SDGs)*. Secara historis, wacana gender mulai muncul ke permukaan sekitar tahun 1940-an yang digagas oleh kaum feminis di dunia barat, kemudian mulai mencuat sekitar tahun 1977 ketika kelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchat* atau *sexist* dalam membahas hubungan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan perkembangan yang cerdas, karena sebenarnya masalah ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagean besar dibentuk oleh perbedaan konstruksi “perempuan” dan “laki-laki” secara sosial budaya, dan bukan secara biologis (seks atau kelamin). Oleh karena itu, pemindahan wacana ketidaksertaan tersebut dari ranah biologis ke ranah sosial budaya/gender secara teoretis lebih efektif (Nugroho, 2008; x). Selanjutnya hal ini menjadi semakin menarik perhatian banyak ilmuwan sosial khususnya kaum feminis. Perhatian kaum feminis terhadap persoalan gender dan



perempuan disebabkan oleh masih adanya ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Eksistensi perempuan di dalam masyarakat masih dipandang sebagai warga kelas dua, sehingga mereka masih menduduki posisi subordinat dan termarginal. Posisi demikian ini kurang menguntungkan bagi kaum perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia.

Di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak berhenti meskipun ia telah tiada. Cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupa dengan Kartini misalnya R.A Sitinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain.

Perjuangan hak perempuan di Indonesia dimulai oleh perjuangan Kartini yang merupakan embrio perjuangan perempuan di Indonesia. Terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang memunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan ketrampilan, perlindungan hukum dan lain-lain merupakan bentuk pergerakan perempuan pasca Kartini. Pada era berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta dan kongres ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Namun demikian selama setengah abad dari pelaksanaan kongres ini, pergerakan perempuan Indonesia belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, meskipun setelah merdeka persamaan hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan telah tertuang dalam pasal 27 UUD 1945.

Saat ini secara normatif baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini telah tercantum adanya hak, kewajiban dan kesempatan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek pembangunan. Disamping itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi *International Labour Organizatin* (ILO) No.III dengan UU No. 80 tahun 1957 tentang pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya



dan pemerintah Indonesia juga dengan UU.No.7 tahun 1984 telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

Kebijakan dan strategi pembangunan mulai dari *Women in Development* (WID), *Women and Development* (WAD) *Gender and Developmen* (GAD) dan *Gender Mainstreaming* (GM) yang diikuti oleh strategi pengarusutamaan gender melalui Inpres No. 9 tahun 2000 telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di masyarakat. Kesetaraan dan keadilan Gender menjadi Visi dari pembangunan pemberdayaan Perempuan. Namun demikian, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tiga dasa warsa lebih nampaknya belum menampakan hasil yang maksimal. Hal ini tercermin dari kenyataan yang masih terjadi di masyarakat Bali pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Buleleng di mana ketimpangan gender pada beberapa bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ketenagakerjaan termasuk di bidang pariwisata, masih relatif menonjol.

Munculnya permasalahan perempuan dan isu gender di masyarakat pada dasarnya disebabkan adanya konstruksi sosial budaya yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan fisiologis dari laki-laki dan perempuan. Ideologi gender yang berkembang dan dipahami di masyarakat telah menentukan bahwa ranah domestik adalah dunianya perempuan sedangkan ranah publik menjadi dunianya laki-laki. Dikotomi peran yang demikian yang kemudian diiringi dengan munculnya budaya patriarki cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlakuan seperti perlakuan diskriminatif yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender yang demikian (Arjani, 2003) pada beberapa aspek kehidupan di masyarakat mengakibatkan terjadinya ketimpangan gender.

Pada saat ini di tingkat Provinsi dan Kabupaten telah terbentuk struktur kelembagaan yang khusus menangani pemberdayaan perempuan, sebagai wujud komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani masalah perempuan,. Di tingkat Provinsi Bali sejak pertengahan tahun 2008 bagian Pemberdayaan Perempuan telah di ubah statusnya menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu di Kabupaten Buleleng juga telah berubah dari awalnya sub bagian menjadi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Meskipun lembaga khusus yang menangani peningkatan Kesetaraan



dan Keadilan Gender (KKG) telah dibentuk lengkap dengan kebijakan dan program-programnya, bukan berarti KKG ideal dapat dicapai dengan mudah. Seperti telah disinggung di atas bahwa permasalahan KKG masih terjadi di masyarakat terlihat lebih jelas.

Belum tercapainya KKG bisa dilihat dengan masih terjadinya kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan. Untuk memberi gambaran secara lebih nyata tentang kesenjangan gender yang masih terjadi sangat diperlukan bukti-bukti berupa data pendukung yang terpublikasi dalam bentuk buku Profil Gender Terpilah. Dengan demikian akan dapat diketahui secara lebih jelas kesenjangan yang terjadi yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang ada pada buku Profil Gender dapat dipakai dasar dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Jika para perencana sudah mampu menyusun PPRG berlandaskan pada data riil yang ada di Kabupaten Buleleng, maka dapat dipastikan strategi pengarusutamaan gender dapat di aplikasikan secara cepat. Ini pada gilirannya akan dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, untuk memotivasi semangat daerah dalam mencapai KKG, maka pemerintah Indonesia memberikan penghargaan berupa Anugrah Parahita Ekapraya yang biasanya diserahkan langsung oleh Presiden setiap tanggal 22 Desember bertepatan dengan perayaan hari ibu. Untuk kepentingan Anugrah Parahita Ekapraya, maka adanya data terpilah menurut jenis kelamin yang tertuang dalam bentuk buku Profil Gender merupakan salah satu persyaratannya.

1.2.Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan buku Profil Gender ini bertujuan untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekokomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Profil Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukenali isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan



khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud.

1.2.2. Tujuan Khusus

Manfaat khusus dari penyusunan buku Profil Gender Kabupaten Buleleng ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/ kegiatan serta anggaran pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi.

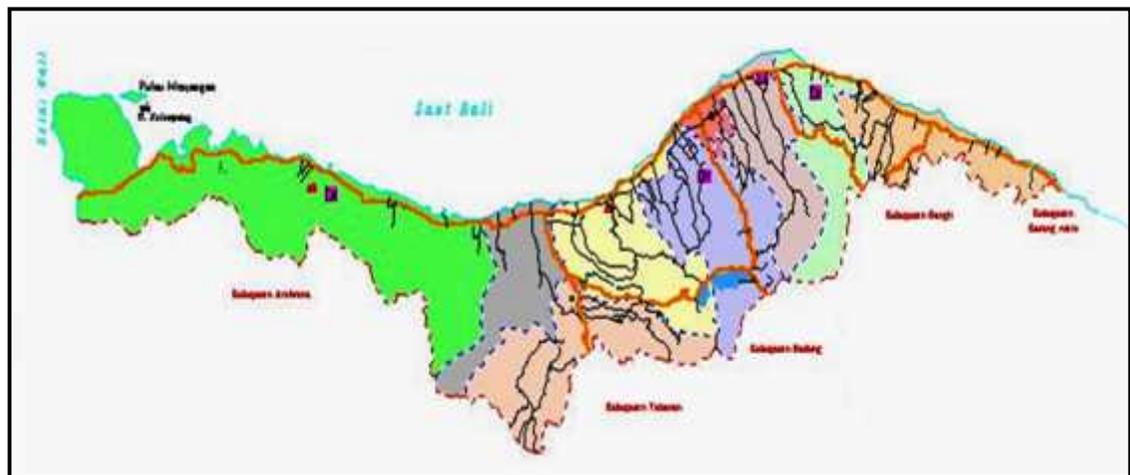


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG

2.1 Kondisi Geografis

Kondisi Geografis Kabupaten Buleleng dapat digambarkan sebagai berikut.

2.1.1 Letak Geografis



Gambar 2.1.
Peta Administratif Wilayah Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Secara Geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi $8^{\circ} 03' 40''$ - $8^{\circ} 23' 00''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 25' 55''$ - $115^{\circ} 27' 28''$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa/Bali
- Timur : Kab. Karangasem.
- Selatan: Kab. Bangli, Badung, Tabanan dan Jembrana.
- Barat : Kab. Jembrana.



2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang paling luas diantara 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu 1.365,88 km² (24,25% dari luas Provinsi Bali), dengan panjang pantai ± 157,05 km. Secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 129 Desa dan 169 Desa Pakraman/Desa Adat, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan Gerokgak :	356,57	Km ²	atau	26,11%;
Kecamatan Busungbiu :	196,62	Km ²	atau	14,40%;
Kecamatan Sukasada :	172,93	Km ²	atau	12,66%;
Kecamatan Banjar :	172,60	Km ²	atau	12,64%;
Kecamatan Kubutambahan :	118,24	Km ²	atau	8,66%;
Kecamatan Seririt :	111,78	Km ²	atau	8,18%;
Kecamatan Tejakula :	97,68	Km ²	atau	7,15%;
Kecamatan Sawan :	92,52	Km ²	atau	6,77%;
Kecamatan Buleleng :	46,94	Km ²	atau	3,44%.

2.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Buleleng yang membujur dari barat ke timur memiliki topografi yang sangat unik dibandingkan daerah lainnya di Bali, dapat diidentifikasi bahwa di bagian selatan merupakan wilayah dengan topografi yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan, sedangkan di bagian utara merupakan wilayah dataran di sepanjang pantai dari timur ke barat. Dilihat dari kondisi morfologi atau topografi daerah Buleleng, sebagian luas lahannya 70.226 Ha (51,41%) merupakan daerah landai, sebagian lagi 21.462,75 Ha (15,71%) daerah miring dan 32.643,50 Ha (23,89%) daerah terjal, sisanya 12.264,75 Ha (8,98%) daerah datar.

Kondisi topografi yang demikian ini melahirkan sebutan lain untuk wilayah Buleleng yaitu “*Nyegara-Gunung*” yang mengindikasikan begitu menyatunya antara pegunungan dan pantai/laut. Diantara perbukitan yang membentang di bagian selatan tersebut terdapat gunung yang bukan gunung berapi. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1.903 m) berada di Kecamatan Sukasada dan yang terendah Gunung Jae (222 m) di Kecamatan Gerokgak. Berdasarkan kondisi morfologi atau topografi daerah Buleleng, sebagian luas lahannya atau seluas 70.226 Ha (51,41%) merupakan daerah berbukit/pegunungan.



2.2 Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena yang paling berperan dalam pembangunan adalah penduduk sebagai subyek sekaligus obyek. Apabila tidak dikelola dengan baik jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah tersendiri dan menjadi beban pembangunan.

2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Perkembangan penduduk di Kabupaten Buleleng selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2016 650.100 jiwa, dengan komposisi 323.800 jiwa laki-laki dan 326.300 jiwa perempuan dengan sex ratio 99,23, pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng 653.600 jiwa dengan komposisi 325.600 laki-laki dan 328.000 perempuan dengan sex ratio 99,27. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016-2017 mencapai 0,54% (Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2018).

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan selama lima tahun terakhir seperti disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

No	Tahun	Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
1	2	3
1	2012-2013	0,63
2	2013-2014	0,63
3	2014-2015	0,61
4	2015-2016	0,60
5	2016-2017	0,54

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2017 dan 2018

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng.



Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 1.365,88 km² sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2017 adalah 479 jiwa/km². Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2.
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 (000 jiwa)

No.	KECAMATAN	LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	SEX RATIO (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Gerokgak	42,10	41,79	83,89	100,74
2.	Seririt	35,63	36,94	72,57	96,45
3.	Busungbiu	20,27	20,55	40,53	98,64
4.	Banjar	35,78	36,48	72,26	98,08
5.	Sukasada	38,35	38,74	77,09	98,99
6.	Buleleng	68,09	68,70	136,79	99,11
7.	Sawan	29,86	30,62	60,48	97,52
8.	Kubutambahan	28,11	27,44	55,55	102,44
9.	Tejakula	27,41	26,74	54,15	102,50
	JUMLAH TAHUN 2017	325,60	328,00	653,60	99,27
	<i>JUMLAH TAHUN 2016</i>	<i>323,80</i>	<i>326,30</i>	<i>650,10</i>	99,23
	<i>JUMLAH TAHUN 2016</i>	<i>321,90</i>	<i>324,30</i>	<i>646,20</i>	99,26
	<i>JUMLAH TAHUN 2016</i>	<i>320,00</i>	<i>322,30</i>	<i>642,30</i>	99,29
	<i>JUMLAH TAHUN 2016</i>	<i>318,00</i>	<i>320,30</i>	<i>638,30</i>	99,28

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2018

2.2.2 Tenaga Kerja

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara tidak langsung menuntut penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan keadaan pada tahun 2017, Angkatan Kerja di Kabupaten Buleleng adalah sebesar 75,44% yang terdiri dari telah bekerja 73,62%, sekolah 6,65%, mengurus rumah tangga 13,97%, yang sedang mencari kerja (pengangguran) sebesar 1,82% dan lainnya 3,94%.



Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng yang bekerja menurut lapangan usaha utama pada tahun 2017 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama Pada Tahun 2017

No	Lapangan Usaha Utama	Persentase
1	2	3
1	Pertanian	31,88
2	Pertambangan	0,28
3	Industri	12,46
4	Listrik, Gas dan Air	0,11
5	Bangunan	7,56
6	Perdagangan	26,92
7	Komunikasi	1,93
8	Keuangan	2,67
9	Jasa	16,19

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2018

2.2.3 Angka Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti : faktor kultural, alamiah, dan struktural serta adanya ketidakmampuan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan yang lain-lainnya.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan internasional, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen dan berupaya untuk menguranginya melalui upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan. Kompleksnya permasalahan kemiskinan, menjadikan kemiskinan tersebut belum dapat terentaskan keseluruhan. Kompleksitas kemiskinan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (kebijakan ekonomi), kondisi politik serta keamanan dan ketertiban suatu bangsa maupun daerah.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Keadaan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali tahun 2014-2018 di sajikan pada tabel 2.4.



Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Provinsi Bali Tahun 2014-2018

Tahun	Penduduk Miskin di Buleleng		Penduduk Miskin di Bali	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%
1	2	3	4	5
2014	43,70	6,79	196	4,76
2015	43,43	6,74	196,71	4,74
2016	37,55	5,79	178,18	4,25
2017	37,48	5,74	180,13	4,25
2018	35,20	5,36	171,76	4,01

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng diakses 10 Februari 2019

Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan, namun secara relatif (persentase), persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bali. Karena itu penanggulangan kemiskinan masih perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pembangunan Kabupaten Buleleng.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu dari enam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada RPJMD tahun 2017-2022. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin akan terus menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2.2.4 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya peningkatan produksi disuatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali, Buleleng mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki, meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada maka lambat laun SDM tidak akan mampu mengakses peluang yang ada, dan peluang kerja akan diisi oleh para pendatang.



Selama lima tahun terakhir IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 68,85, tahun 2014 meningkat menjadi 69,19, tahun 2015 meningkat menjadi 70,03, tahun 2016 meningkat menjadi 70,65, dan tahun 2017 meningkat menjadi 71,11. Angka IPM tersebut secara eksplisit menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

2.2.5 Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah umumnya ditentukan berdasarkan pada kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB. Dikatakan potensi unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB konsisten dari waktu ke waktu dan memiliki kemampuan bersaing dibandingkan daerah lain.

Potensi unggulan yang ada di Kabupaten Buleleng dapat di kelompokkan menjadi beberapa produk unggulan yaitu :

1. Pertanian, terdiri dari mangga, pisang dan durian;
2. Perkebunan, terdiri dari kopi robusta;
3. Peternakan, terdiri dari sapi dan babi;
4. Perikanan, terdiri dari ikan kerapu, ikan bandeng;
5. Industri kecil/kerajinan, terdiri dari anyaman inovatif dan anyaman bambu.

2.3 Visi dan Misi 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Buleleng

2.3.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022 yang menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 (RPJMD) adalah sebagai berikut.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN *TRI HITA KARANA*”



Visi itu bermakna sebagai berikut.

Mandiri mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejahtera mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

Berdaya Saing mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

Berlandaskan Tri Hita Karana mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

2. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
5. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
6. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
7. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun). Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan strategi



pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Buleleng yang sejahtera, adil dan lestari.

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dapat dijadikan payung ataupun pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan. Kepala Daerah di dalam upaya mewujudkan visi dan misinya merumuskan dan mengembangkan beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 1: Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1	Meningkatnya investasi	Mengembangkan sebaran investasi PMDN dan PMA	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
			Memantapkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan penerimaan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
	2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing	Mengembangkan pendidikan dan latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan			Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	



3	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial
		Meningkatkan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS

Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Produk Unggulan Daerah

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
Berkembangnya produk unggulan daerah	1	Meningkatnya nilai produk pertanian	Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian	Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian
	2	Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Meningkatkan sebaran industri pengolahan	Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri
			Mengembangkan DTW dan kawasan pariwisata	Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
	3	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM	Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
			Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
			Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal	Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Professional, Berbudaya dan Berintegritas

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional,	1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas pendidikan jenjang SD/MI	Pemenuhan hak masyarakat mendapatkan layanan pendidikan merata dan berkualitas jenjang SD /



TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
berbudaya, dan berintegritas				MI
			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan jenjang SMP/MTs	Pemenuhan hak masyarakat mendapatkan layanan pendidikan merata dan berkualitas jenjang SMP/MTs
			Penguatan proses akreditasi seko-lah pada jenjang Pendidikan Dasar	Peningkatan capaian SPM dan standar nasional pendidikan dasar
	2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatkan peran serta pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
			Meningkatkan upaya pemasyarakatan olahraga pada masyarakat	Pemenuhan kualitas sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlit olahraga
	3	Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi ibu dan anak	Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak
			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan
			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas percepatan perbaikan gizi bagi Ibu dan Anak	Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi, terutama untuk ibu hamil, anak, dan balita
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan
			Pemenuhan akreditasi RSUD guna peningkatan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan



TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
			kualitas kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
			Pemenuhan sarana parsarana, Obat dan perbekalan kesehatan serta kapasitas SDM pada RSUD sesuai Standar	Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan Masyarakat RSUD SPM
	4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran	Meningkatkan aksesibilitas data mikro keluarga dan penguatan peran stakeholder dalam pengendalian penduduk	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan pengendalian kelahiran
			Meningkatkan pemenuhan cakupan Keluarga Berencana (KB)	Penguatan peran PLKB dalam perluasan cakupan pelayanan KB
	5	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan anak	Peningkatan efektivitas layanan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Penguatan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)
	6	Meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah	Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan penjurangan karir	Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier ASN secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (<i>merit based</i>)
	7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan nilai hasil AKIP Daerah	Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT,



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			PK, dan LAKIP)
		Meningkatkan kinerja manajemen Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan publik	Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, asistensi, pendampingan uuntuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi 4: Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui " Gotong Royong "
		Meningkatkan akurasi data dan informasi perkembangan desa dalam mendukung percepatan akselerasi pembangunan perdesaan	Mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
		Mengembangkan iklim demokrasi yang harmonis, berbudaya dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Mendukung penyelenggarakan pemilihan legislatif, presiden, dan DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, berbudaya, dan damai.
	2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui pengembangan usaha mikro perempuan
		Meningkatkan peran	Meningkatkan dan



TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
			serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan	memeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan

Misi 5: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Pemetaan kondisi, kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi terpadu	Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur transportasi serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan secara terpadu
			Pemetaan kondisi dan kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan, air minum, air limbah dan drainase yang layak dan berkelanjutan

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	1	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian lembaga adat	Pengembangan dan pemeliharaan lembaga adat yang memiliki keunikan dan adiluhung
			Meningkatkan penggalian, pengembangan, dan pelestarian benda situs	Melestarikan benda situs dan kawasan cagar budaya



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
		dan kawasan cagar budaya		
	2	Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun	Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana prasarana persampahan dan menumbuhkan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Meningkatkan kualitas sumber-sumber air	Pengendalian pencemaran air dan pemantauan kualitas air pada badan sungai	

Dari uraian Strategi dan Arah Pembangunan Buleleng di atas, pengarusutamaan gender dinyatakan pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada misi 4.

2.5 Prioritas Pembangunan

Visi, misi dan sasaran pokok pembangunan menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan juga prioritas dan sasaran Propinsi Bali, pencapaian SDGs, Standar Pelayanan Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari prioritas pembangunan Buleleng, Nampak pencapaian SDGs yang memuat pengarusutamaan gender menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng.



BAB III GENDER: KONSEP DAN TEORI

3.1 Gender dan Jenis Kelamin

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin *genus* yang berarti tipe atau jenis. Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-laki dan perempuan. Dua jenis manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat alamiah atau biologis (*nature*), dan ada yang bersifat sosial-budaya (*culture*). Perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial-budaya, yang bisa berubah dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu waktu ke waktu lainnya disebut gender.

Secara alamiah atau biologis laki-laki dan perempuan memang memiliki tugas dan peran alamiah yang berbeda karena kelengkapan biologis yang dimiliki. Laki-laki memiliki kelengkapan biologis berupa penis dan sperma, memiliki tugas alamiah membuahi. Sedangkan perempuan memiliki indung telur, rahim, vagina, dan payudara, memiliki tugas, (setelah indung telur dibuahi oleh laki-laki), hamil, mengandung janin, melahirkan anak, menyusui dan merawat bayi. Tugas alamiah laki-laki dan perempuan karena kelengkapan biologis yang dimiliki itu, tidak berubah menurut tempat dan waktu. Itu dapat disebut kodrat. Kodrat itu tidak dapat digugat sebagai tidak setara dan tidak adil bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan.

Namun, sejumlah kebudayaan memberikan *stereotype* kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang kuat, rasional, mampu melindungi dan lainnya. Sedangkan perempuan dipandang lemah lembut, emosional, sabar, butuh perlindungan dan lainnya. Karena itu kemudian laki-laki diberi tugas sebagai kepala keluarga, mencari nafkah ke sektor publik. Sedangkan perempuan diberi tugas di sektor domestik, mendidik anak di rumah, mengurus



rumah, dan melayani suami. Kebudayaan tertentu lebih spesifik menyebutkan tugas perempuan berada di sekitaran sumur, dapur, dan kasur. *Stereotype* dan tugas laki-laki dan perempuan seperti ini merupakan konstruksi sosial-budaya yang dapat berubah menurut tempat dan waktu, tidak dapat disebut sebagai kodrat. *Stereotype* tugas laki-laki dan perempuan bentukan sosial-budaya ini, di tempat dan waktu yang berbeda bisa saja digugat karena dipandang tidak setara dan tidak adil.

3.1.1 Gender Menurut Definisi Para Ahli

Persoalan gender mendapat perhatian para ahli karena muncul isu-isu gender yang disuarakan oleh kaum perempuan yang merasa mendapat perlakuan tidak setara dan tidak adil. Seandainya kaum perempuan menerima saja peran yang ditambahkan oleh kebudayaan kepada peran yang merupakan kodrat, maka tidak akan ada yang mempersoalkan gender. Karena gugatan kaum perempuanlah para ahli mengkaji persoalan gender.

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender (Fakih, 2006: 71).

Gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan (Santrock, 2003: 365).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (Abdullah, 2003: 19).

Pengertian gender disandingkan dengan jenis kelamin dapat dideskripsikan sebagai berikut:



No	Gender	Jenis Kelamin
1	2	3
1	Menyangkut pembedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat.	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.
2	Peran sosial budaya dapat berubah:Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, di samping menjadi istri juga.	Peran reproduksi tidak dapat berubah:Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.
3	Peran sosial dapat dipertukarkan:Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah ke luar rumah bahkan sampai ke luar negeri.	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.
4	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan.	Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.
5	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.	Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja.
6	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan strata lainnya.	Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial.
7	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tetapi buatan manusia	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau kodrat.

3.1.2 Gender dalam Kajian Teori

Ada sejumlah teori sosial yang dapat menjelaskan persoalan gender. Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui *konstruksi sosial budaya*, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.



Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai *proletar*. Konstruksi sosial yang dirasakan tidak adil bagi perempuan ini mendorong perempuan memperjuangkan statusnya.

Perjuangan untuk persamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep *fifty-fifty*, konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* secara kuantitas. Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami Karl Mark (1818-1883) dan Machiavelli (1469-1527) dilanjutkan oleh David Lockwood (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika.

Karena itu aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk. Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat misalnya, pimpinan partai politik, DPR, Militer, Menteri, Gubernur, Pilot, dan Manajer.

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas. Lalu beralih ke teori nature. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas, begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan



antara suami istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Talcott Parson (1902-1979) dan Parson & Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui Pola Pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesempatan (komitmen) dalam kehidupan masyarakat.

Teori Equilibrium menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

Teori Struktural-Fungsional, muncul di tahun 1930-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya interrelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*). Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga fungsi seseorang dalam sistem menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni tersebut. Ini berlaku untuk sistem sosial: agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal



ini termasuk mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur tersebut dilakukan dengan institusionalisasi, melalui norma-norma yang disosialisasikan.

3.2 Ksetaraan dan Keakadilan Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup keadaan sebagai berikut.

3.2.1 Marjinalisasi atau Peminggiran

Proses marjinalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.

Contoh-contoh marjinalisasi:

- a. Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki.
- b. peluang untuk menjadi pimpinan di lingkungan TNI (jenderal) lebih banyak diberikan kepada laki-laki ketimbang perempuan.
- c. Sebaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.



3.2.2 Subordinasi

Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat.

Contoh-contoh sub-ordinasi

- a. Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-kanak’, sekretaris”, atau “perawat’, yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen diperguruan tinggi, dokter, dan tentara. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan.
- b. Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibanding pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.
- c. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.
- d. Apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian ke luar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis laki-laki seringkali merasa tertekan.
- e. Sebagai seorang laki-laki menjadi bawahan seorang perempuan, maka pola pikir seorang laki-laki masih memandang bos perempuan tadi sebagai makhluk lemah dan lebih rendah. Sehingga laki bawahan merasa “kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki.



3.2.3 Pandangan Stereotipe

Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotipe selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

Contoh-contoh Stereotipe

- a. Tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik.
- b. Label kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.
- c. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai. Kegiatan di masyarakat bahkan ditingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan "perpanjangan" dari peran domestiknya. Misalnya karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja dibagian penjualan.
- d. Apabila laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.

3.2.4 Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumah tangga sendiri



maupun di tempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara. Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang.

Contoh-contoh kekerasan (fisik maupun mental psikologis)

- a. Istri menghina / mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami.
- b. Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial /ethnis atau antar negara.
- c. Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah.
- d. Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan –kesempatan meningkatkan SDMnya.
- e. Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah.
- f. Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- g. Orang tua memukul dan mengahajar anaknya.

3.2.5 Beban Ganda Bagi Perempuan

Beban ganda adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia yang nanti di akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan.

Contoh-contoh beban kerja

- a. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double burden*).



- b. Seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya di atas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor.
- c. Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Apabila yang mencuci isteri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya.

3.3 Pengarusutamaan Gender

Kajian tentang perempuan umumnya bukan sekedar untuk mendapatkan pemahaman tentang perempuan itu sendiri tetapi juga pemahaman tentang laki-laki dan tentu yang lebih penting adalah untuk memahami juga bagaimana suatu masyarakat terorganisasi. Bagaimanapun juga perempuan tidak mungkin terlepas dari sistem sosialnya dan tentunya terdapat banyak nilai yang melekat pada perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial di mana ada keterlibatan berbagai kekuatan di dalamnya (Abdullah, 1997).

Usaha memahami perempuan juga merupakan usaha memahami masyarakat dan usaha ini tidak akan berhasil apabila tidak menggunakan teori-teori sosial yang ada. Memang ada bahayanya karena teori sosial yang ada saat ini merupakan konstruksi dari kaum laki-laki, seperti apa yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir bahwa dunia itu hasil karya laki-laki dan wanita hanyalah “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak diperhitungkan. (Abdullah, 1997)

Menghadapi hal ini maka kajian tentang perempuan harus dilakukan dari dua arah yaitu dari sisi teoretis dan dari sisi empiris, dengan kata lain suara perempuan harus didengarkan dalam usaha mempertanyakan keabsahan teori sosial yang ada saat ini (Abdullah, 1997: v)

Dalam mempelajari perempuan tidak akan terlepas dari tiga proses sosial dalam pembentukan realitas perempuan, yaitu: konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi. (Berger dalam Abdullah, 1997: 5). Konstruksi merupakan susunan suatu realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Dekonstruksi terjadi saat keabsahan realitas (objektif) kehidupan wanita



dipertanyakan yang kemudian memperlihatkan praktik-praktik baru dalam kehidupan wanita. Dekonstruksi ini kemudian menghasilkan suatu proses rekonstruksi, yang merupakan proses rekonseptualisasi dan redefinisi wanita. (Abdullah, 1997: 5)

Pada awal perkembangannya perempuan memang selalu diposisikan pada wilayah domestik dimana seorang wanita harus berada di rumah mengurus suami dan anak sehingga muncul konsep perempuan yang baik atau sempurna adalah perempuan yang dapat menjadi istri yang dengan baik dan penuh pengabdian melayani suami dan juga menjadi pendidik anak-anak mereka agar dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Inilah yang selalu ditanamkan pada perempuan sepanjang hidupnya bahkan telah direproduksi dalam berbagai bentuk wacana yang menjadi kekuatan penting dalam membentuk perempuan tentang peran penting domestik mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perayaan hari ibu yang menegaskan betapa penting dan mulianya peran seorang ibu, demikian juga peringatan hari Kartini yang awalnya merupakan perlambang perlawanan kaum perempuan, tetapi saat ini telah berubah maknanya mengkonstruksi peran perempuan.

Dengan perkembangan jaman saat ini, dimana perempuan sudah mulai merambah ke wilayah publik, tentunya ada banyak perubahan pada sistem sosial masyarakat. Seperti adanya pembagian peran dalam mengurus anak, bahkan peran perempuan sebagai ibu yang berhak untuk melahirkan dapat terabaikan dan terkadang hak-hak perempuan seperti hak cuti melahirkan atau cuti saat haid dapat terabaikan pula karena hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Bukan hanya itu tetapi terjadi pula pengambilalihan sektor-sektor yang awalnya dikuasai perempuan, oleh laki-laki. Hal ini terjadi ketika kesempatan kerja bagi laki-laki mulai berkurang, kemudian mereka mulai mengambil alih atau melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang semula ditangani oleh perempuan (Abdullah, 1997: 12). Hal lain juga terjadi ketika perempuan mulai merambah ke sektor publik, tetap laki-lakilah yang diutamakan, dan jika peluang laki-laki terbatas maka mereka akan melakukan marginalisasi terhadap perempuan (Abdullah, 1997: 12) Walaupun perempuan dipekerjakan, itu karena mereka merupakan angkatan kerja dengan upah yang rendah sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya.

Banyak gerakan yang terutama didukung oleh ideologi feminisme telah menyadarkan perempuan untuk terjun ke dunia publik dan gerakan semacam ini telah menghasilkan pengaruh



yang cukup dahsyat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam dunia publik secara kuantitatif terus meningkat serta dari jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan pun makin lama makin meningkat. Namun, yang patut untuk mendapat perhatian adalah dari sisi kualitas keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti upah mereka yang masih rendah, keterlibatan mereka dalam menentukan kebijakan dan suara mereka dalam dunia publik masih belum didengar.

Melihat pada berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam dunia publik, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan tidak sepenuhnya diterima oleh laki-laki dan tidak mendapatkan pengesahan secara kelembagaan. Laki-laki masih menilai perempuan sebagai ibu/istri, bukan sebagai pekerja yang profesional. Hal ini terlihat dari struktur upah yang timpang dan dari jenis pekerjaan yang “diperbolehkan” untuk perempuan. Di sini laki-laki telah memproduksi ketimpangan gender dengan melihat perempuan lebih sebagai “pendatang” atau “pelengkap”, bukan sebagai mitra kerja (Abdullah, 1997: 17)

Sebenarnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan ini sudah mulai di bahas terutama dengan dikembangkannya konsep emansipasi dan ini terjadi sekitar tahun 1950-1960, seperti yang dikembangkan oleh badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957, dimana untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan yang kemudian disusul melalui ECOSOC dengan resolusi yang pertama pada 12 Juli 1963 yang secara khusus mengakui pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi nasional (Achmad, 1991: 98).

Namun baru pada awal tahun 1970-an, yaitu pada awal pelaksanaan Strategi Pembangunan Internasional PPB yang kedua (1971-1980) permasalahan pemerataan mulai memperhatikan perbedaan pendapatan dan kekuatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jaminan hukum hak-hak asasi antara laki-laki dan perempuan sudah di sadari secara internasional sejak akhir perang dunia kedua, hal ini tercermin dari berbagai pasal dalam Charter PBB tahun 1948 (Achmad, 1991: 101).

Kemudian dipertegas lagi dengan diadakannya konferensi dunia di Mexico pada tahun 1975, dimana konferensi dunia ini diselenggarakan karena disadari bahwa isu wanita dalam



pembangunan tidak termasuk dalam agenda konferensi dunia wanita internasional yang diadakan sebagai kebangkitan kembali gerakan yang dimulai tahun 1960-an. Mengingat isu tentang wanita sangat penting dan perlu di angkat kepermukaan. Konferensi ini diadakan karena memperhatikan bahwa seringkali pembangunan yang dilaksanakan berdampak merugikan wanita dan proyek-proyek pembangunan seringkali meremehkan serta tidak menganggap peran tradisional wanita dibidang sosial maupun ekonomi, sehingga hal ini makin memperlebar jurang perbedaan kesempatan yang tersedia bagi laki-laki maupun wanita. (Raharjo, 1991: 109) Adapun konferensi ini menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan & laki-laki dalam hal: (1) Pendidikan & pekerjaan; (2) Prioritas pembangunan bagi perempuan; (3) Perluas peran serta dalam pembangunan; (4) Tersedia data & informasi peran serta; (5) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Kemudian pemikiran tentang pengarusutamaan gender ini berkembang dalam *World Conference UN Mid Decade of Women*, Kopenhagen pada tahun 1980 yang menghasilkan *UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* – konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian Indonesia meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Konferensi Perempuan keempat, Beijing, 1995 menyepakati 12 isu kritis yang sesegera harus ditangani. Indonesia telah menandatangani *Beijing Platform for Action* mengenai agenda kesepakatan internasional untuk memberdayakan perempuan.

Pemikiran mengenai pengarusutamaan gender di Indonesia sendiri telah berkembang sejak Kongres Perempuan Indonesia, Yogyakarta, 22 Desember 1928 yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Sebenarnya isu kesetaraan gender sudah mulai mengemuka dengan adanya Kementerian Perempuan pada tahun 1978 di kabinet Pembangunan II. Kemudian pemikiran pengarusutamaan gender ini berlanjut pada Deklarasi Komitmen Bersama Negara & Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1999. Pada tahun 1999 dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, “kesetaraan dan keadilan gender” telah dituangkan dalam GBHN 1999. Pada tahun 2004, dalam Rencana Kerja Pemerintah program-program yang mengandung pengarusutamaan gender telah lebih mendapat



perhatian yang cukup besar yang terlihat dari berbagai program pembangunan di 9 (sembilan) sektor pembangunan yang sudah memuat berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) (Sadiawati, 2004: 2)

Umumnya penyebab dari timbulnya permasalahan-permasalahan pembangunan yang merugikan wanita antara lain karena adanya kekeliruan dalam perencanaan pembangunan, seperti (1) gagal memperhatikan peran produktif wanita yang secara tradisi telah dimainkan; (2) mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas wanita dibatasi sekitar tugas-tugas rutin rumah tangga dan di sekitar mengurus anak; (3) merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat yang sedang berkembang (Raharjo, 1991: 110-111)

Konfrensi yang diadakan di Mexico yang bertemakan “*Equality, Development and Peace*” akhirnya menghasilkan dua kubu dalam memandang masalah wanita. Kubu dari negara-negara maju cenderung untuk menekankan persamaan dalam hal perjuangan, sedangkan kubu negara-negara sedang berkembang permasalahan persamaan itu masih merupakan permasalahan yang dianggap “mewah”, mereka lebih menuntut pada penghapusan kemiskinan sebagai fokus perjuangan mereka. Dalam hal ini wanita harus merupakan bagian dari pembangunan atau dengan kata lain terintegrasinya wanita dalam pembangunan. Sehingga yang dimaksud dengan wanita dalam pembangunan adalah terintegrasinya wanita dalam proses pembangunan, wanita harus menjadi subjek sekaligus penikmat dari pembangunan dan bukan lagi sebagai atribut yang pasif, karena dalam istilah teritegrasi wanita dituntut untuk berperan sebagai aktor yang aktif dan kreatif (Raharjo, 1991: 113).

Regulasi yang pertama dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang menginstruksikan kepada seluruh kantor kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif



gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pelaksanaan dari Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti antara lain dengan terbentuknya fokal poin atau kelompok kerja sesuai dengan bidang-bidang/sector masing-masing, yaitu 9 sekto/bidang pembangunan yang dijabarkan dalam 36 program. Sektor yang dimaksud adalah sektor pertanian, sosial budaya, hukum, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, keluarga berencana dan lingkungan hidup. Di dalam pelaksanaan program-program dari 9 (sembilan) sektor pembangunan tersebut, khususnya bidang pembangunan hukum yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta), fokal poin bekerjasama dengan kelompok kerja bidang pembangunan hukum setiap tahunnya selalu melakukan rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan pengarusutamaan gender dalam setiap program yang akan dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan program setiap tahunnya dapat dilihat hasilnya melalui evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan program (Sadiawati, 2004: 2-3).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Sosial ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, yang merupakan peraturan pembaharuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimuat Tahapan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Termasuk di dalamnya diatur tentang Focal Point, dan tentunya Tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi. Termasuk di dalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

3.3.1 Analisis Gender

Analisis gender adalah proses penganalisisan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Analisis Gender dapat juga diartikan sebagai suatu analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atas program dan/atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan. Analisis gender mengakui bahwa realitas kehidupan



perempuan serta laki-laki adalah berbeda, sedangkan kesempatan yang sama tidak harus berarti menghasilkan hasil yang sama. Analisis gender timbul dari keperluan untuk menjadikan pengalaman, perhatian, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki ke dalam arus utama. Analisis gender mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan di antara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Analisis gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisis gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini beragam sifatnya menurut waktu, budaya, kelas sosial, etnik dan faktor-faktor lainnya. Itu sebabnya analisis gender tidak memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang homogen, tetapi memperlakukan sifat-sifat atas dasar gender sebagai sesuatu yang dapat diubah dan memerlukan data terpilah menurut jenis kelamin.

Analisis gender yang diaplikasikan untuk intervensi pembangunan dapat mendorong: (1). Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender atau faktor penyebab terjadinya kesenjangan; (2). Mengidentifikasi isu-isu gender, yaitu isu yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan atas dasar gender yang mungkin terjadi di antara anggota keluarga dan/atau di dalam masyarakat dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan; (3). Memungkinkan para perencana melakukan perencanaan yang efektif, efisien, berkeadilan dan memberdayakan melalui rancangan kebijakan dan strategi yang tepat dan sensitif terhadap isu-isu gender.

Untuk dapat melakukan analisis gender, perlu dipahami faktor-faktor yang memengaruhi analisis gender, antara lain sebagai berikut.

1. **Akses** : Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).



2. **Partisipasi:** Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.
3. **Kontrol:** Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.
4. **Manfaat:** Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

Setidaknya ada dua model analisis gender yang biasa dipakai menganalisis data gender hingga didapatkan masalah-masalah gender.

1) *Model Gender Analysis Pathway (GAP)*

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. Model GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender ke dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan.

Model atau metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, control dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat pembangunan. Selain itu dengan model GAP dapat diketahui kesenjangan gender dan permasalahan gender. Dengan mengetahui kesenjangan gender tersebut para perencana atau pembuat kebijakan dapat menyusun rencana melalui penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender. Langkah-langkah analisa Model GAP ini adalah sebagai berikut:



Langkah 1: Tentukan Tujuan Kebijakan

Mengidentifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan, memilih apa yang kita analisis, apakah kebijakan, jika kebijakan yang menjadi fokus analisis maka yang menjadi acuan kita adalah tujuan dari kebijakan tersebut, demikian juga jika kita memilih program atau kegiatan yang dianalisis.

Langkah 2: Menyajikan Data terpilah

Menyajikan data pembuka wawasan, data yang dimaksud adalah data terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD atau review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan.

Langkah 3: Mengenali Isu Kesenjangan Gender

Menemukanali isu gender di dalam proses perencanaan kebijakan/ program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan cara memperhatikan 4 faktor indikator gender yaitu (1). Akses (2). Kontrol (3). Partisipasi dan (4). Manfaat.

Langkah 4: Menemukanali Isu Gender di Internal Lembaga

Menemukanali isu gender di internal lembaga atau budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih terbatas/kurang diantara pengambil keputusan, perencana dan juga political will dari pembuat kebijakan.

Langkah 5: Menemukanali Isu Gender di Eksternal Lembaga

Menemukanali isu gender di eksternal lembaga pada proses perencanaan, misalnya apakah perencana program sensitif gender terhadap kondisi isu gender di dalam masyarakat yang menjadi target program, kondisi masyarakat sasaran yang belum kondusif, misalnya, budaya patriarki dan stereotipe.



Langkah 6: Merumuskan Kebijakan

Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan.

Langkah 7: Menyusun Rencana Aksi

Menyusun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan program/kegiatan yang telah direformulasi sesuai langkah 6.

Langkah 8: Pengukuran Hasil

Menetapkan data dasar untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar dimaksud dapat diambil dari data pembuka wawasan seperti yang telah diungkapkan pada langkah 2.

Langkah 9: Indikator Gender

Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperhatikan apakah kesenjangan gender sudah tidak ada atau berkurang (BAPPENAS, 2002).

2) Model *Problem Based Approach* (PROBA)

PROBA yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan UNFPA. Model ini hampir sama dengan Model GAP. Perbedaannya, Model ini hanya dirancang menjadi 7 (tujuh) langkah sebab dalam Model ini Langkah 1-3 Model GAP menjadi langkah pertama. Adapun langkah-langkah analisis gender model PROBA adalah sebagai berikut.

Analisis masalah gender merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan/merumuskan masalah gender yang terjadi di tiap instansi atau wilayah. Beberapa tahap analisis masalah gender adalah sebagai berikut.



Langkah 1. Identifikasi data terpilah

Identifikasi data di sertai dengan kesenjangan gender yang terjadi di wilayah masing-masing dalam bentuk data yang kualitatif maupun kuantitatif.

Langkah 2. Penetapan masalah kesenjangan gender

Dari data terpilah yang menunjukkan kesenjangan gender tersebut ditetapkan masalah gender dalam bentuk kalimat yang jelas.

Langkah 3. Identifikasi faktor penyebab

Kesenjangan gender diformulasikan dan dianalisis apa yang menjadi faktor penyebab dari kesenjangan, misalnya; faktor sosial/lingkungan, faktor agama, faktor adat istiadat/budaya, faktor ekonomi, faktor peraturan perundang-undangan, faktor kebijakan dan lainnya.

Langkah 4. Telaah Kebijakan

Telaah dari kebijakan, program dan kegiatan merupakan kegiatan untuk menelaah kembali keputusan atau kebijakan/program/kegiatan yang telah di sepakati. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan pada telaah kebijakan yaitu;

1. **Analisis kebijakan:** Menulis kembali kebijakan/program/ kegiatan yang tertulis dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang untuk Pusat dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.
2. **Klasifikasi kebijakan:** Klasifikasikan kebijakan/program/ kegiatan dalam klasifikasi netral (bias) atau responsif gender.
3. **Penetapan kebijakan/program/kegiatan yang strategis**

Dari berbagai kebijakan/ program/ kegiatan yang ada harus dipilih kebijakan/ program/ kegiatan yang strategis yang di harapkan mampu untuk mengatasi masalah pembangunan.



Langkah 5. Formulasi Kebijakan Baru

Dari kebijakan/program/kegiatan strategis yang ternyata bias dan netral gender direformulasikan kebijakan/program/kegiatan baru yang responsif gender. Dari kebijakan baru yang responsif gender, selanjutnya dituliskan tujuan baru yang responsif gender. Bandingkan dengan tujuan yang lama.

Langkah 6. Penyusunan Rencana Aksi

Setelah program pokok ditetapkan, selanjutnya ditentukan rencana aksi dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan. Di dalam uraian kegiatan intervensi, tetapkan pula target/sasaran pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.

Langkah 7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan langkah-langkah analisis dan mengadakan perbaikan apabila diperlukan. Laporan monitoring evaluasi menjadi bahan masukan untuk analisis kebijakan yang diperlukan berikutnya.



BAB IV GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan bersama-sama dengan komponen kesehatan dan ekonomi. Pendidikan merupakan strategi membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pendidikan yang dipakai ukuran sebagai komponen pembentuk IPM adalah lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan selama hidupnya. Selain sebagai komponen pembentuk IPM, pendidikan juga merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan gender dan pembangunan gender. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan haruslah sensitif gender, dalam artian memberikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pendidikan, kesempatan partisipasi dalam pendidikan, kontrol atas sumber daya pendidikan, dan menerima manfaat dari pendidikan.

Dalam rangka mengenali apakah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sudah sensitif gender atau tidak diperlukan data terpilah terkait dengan kinerja penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut.

4.1 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dipakai sebagai salah satu indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan

4.1.1 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar

Angka partisipasi murni Sekolah Dasar adalah proporsi siswa Sekolah Dasar yang berusia 7-12 tahun terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. APM Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.1



Tabel 4.1
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	70
Gerokgak	75,00	73,76	74,88			79,22
Seririt	84,02	77,93	80,97			87,03
Busungbiu	87,82	82,80	85,31			105,62
Banjar	86,22	81,61	83,92			92,07
Sukasada	86,74	80,43	83,58			90,37
Buleleng	92,44	84,78	88,61			96,85
Sawan	93,71	86,46	90,09			103,93
Kubutambahan	94,26	95,32	94,79			100,30
Tejakula	88,27	88,35	88,31			99,35
Kab. Buleleng	87,72	83,49	85,60			93,79

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 4.1, pada tahun 2016 APM SD rerata Kabupaten Buleleng siswa laki-laki lebih tinggi dari APM SD siswa perempuan. Artinya ada kesenjangan gender dominasi laki-laki pada akses pendidikan SD di Kabupaten Buleleng. Namun dilihat per kecamatan ada dua kecamatan yaitu Kubutambahan dan Tejakula APM SD perempuan lebih tinggi dari APM SD Laki-laki.

Tahun 2018 tidak tersedia data terpilah APM SD. Hanya tersedia APM SD laki-laki dan perempuan. Ini berarti stakeholder terkait tidak memilah data APM SD.

4.1.2 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

Angka partisipasi murni SMP adalah proporsi siswa SMP berusia 13-15 tahun terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. APM SMP Kabupaten Buleleng tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	52,06	55,43	53,75			65,62
Seririt	65,46	58,27	61,87			80,17
Busungbiu	83,99	79,38	81,69			114,64
Banjar	83,29	85,22	84,26			105,05
Sukasada	49,58	50,48	50,03			51,49
Buleleng	97,21	93,04	95,12			94,90



Sawan	77,67	74,55	76,10			88,64
Kubutambahan	75,37	78,17	76,77			91,63
Tejakula	66,52	70,26	68,39			84,10
Kab. Buleleng	72,35	71,64	72,00			84,63

Sumber; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari tabel 4.2 pada tahun 2016 APM SMP Kabupaten Buleleng ada kesenjangan gender namun tidak menonjol dengan dominasi laki-laki, di mana APM SMP laki-laki Kabupaten Buleleng lebih tinggi dari APM SMP perempuan. Namun jika dilihat per kecamatan ada lima kecamatan yang APM SMP perempuan lebih tinggi dari APM SMP laki-laki yaitu, Gerokgak, Banjar, Sukasada, Kubutambahan dan Tejakula.

Tahun 2018 tidak tersedia data terpilah APM SMP. Hanya ada data APM SMP gabungan laki-laki dan perempuan. Ini menandakan stakeholder terkait tidak memilah APM SMP menurut jenis kelamin.

4.1.3 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas

Angka partisipasi murni SMA adalah proporsi siswa SMA berusia 15-17 tahun terhadap penduduk kelompok umur 15-17 tahun. APM SMA Kabupaten Buleleng tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Buleleng tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	29,29	27,35	28,32			
Seririt	35,40	31,94	33,67			
Busungbiu	56,83	43,03	49,93			
Banjar	41,16	34,28	37,72			
Sukasada	20,55	15,65	18,10			
Buleleng	79,00	73,93	76,47			
Sawan	29,94	21,06	25,50			
Kubutambahan	46,87	48,18	47,52			
Tejakula	37,41	32,57	34,99			
Kab. Buleleng	41,83	36,44	39,14			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari tabel 4.3 pada tahun 2016 APM SMA Kabupaten Buleleng menunjukkan APM SMA laki-laki lebih tinggi dari APM SMA perempuan yang berarti ada kesenjangan gender pada akses pendidikan jenjang SMA dengan dominasi laki-laki. Namun jika dilihat per kecamatan ada



satu kecamatan yaitu Tejakula yang APM SMA perempuan lebih tinggi dari APM SMA laki-laki.

Tahun 2018 tidak tersedia data APM SMA di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMA bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APM SMA per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMA kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMA di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.1.4 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Kejuruan

Angka partisipasi murni SMK Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Kejuruan
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	25,53	20,00	22,76			
Seririt	44,10	35,95	40,02			
Busungbiu	6,32	4,73	5,53			
Banjar	0,00	0,00	0,00			
Sukasada	26,23	16,72	21,47			
Buleleng	100,14	71,19	85,67			
Sawan	22,52	16,68	19,60			
Kubutambahan	12,44	38,33	25,39			
Tejakula	23,60	15,96	19,78			
Kab. Buleleng	28,99	24,40	26,69			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari tabel 4.4 pada tahun 2016 APM SMK Kabupaten Buleleng menampilkan APM SMK laki-laki lebih tinggi dari APM SMK perempuan yang berarti ada kesenjangan gender pada akses pendidikan SMK dengan dominasi laki-laki.

Tahun 2018 tidak tersedia data APM SMK di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APM SMK per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMK kepada



Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMK di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

4.2.1 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar

Angka partisipasi kasar Sekolah Dasar adalah rasio jumlah siswa Sekolah Dasar terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK Sekolah dasar Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	Rerata
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	88,97	84,24	85,60			109,30
Seririt	96,03	86,97	91,50			97,71
Busungbiu	98,56	89,85	94,20			104,62
Banjar	98,88	91,07	94,97			101,48
Sukasada	99,64	89,81	94,72			101,29
Buleleng	101,11	90,87	95,99			110,33
Sawan	105,65	96,19	100,92			101,52
Kubutambahan	108,65	107,21	107,93			103,16
Tejakula	104,03	100,27	102,15			104,36
Kab. Buleleng	100,17	92,94	96,56			104,40

Sumber: Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari tabel 4.5 pada tahun 2016 APK SD Kabupaten Buleleng ada ketimpangan gender dengan dominasi laki-laki di mana APK SD laki-laki lebih tinggi dari APK SD perempuan.

Tahun 2018 tidak tersedia data terpilah APK SD. Hanya tersedia data APK SD gabungan laki-laki dan perempuan. Ini menandakan stakeholder terkait tidak memilah APK SD berdasarkan jenis kelamin.

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama

Angka Partisipasi Kasar SMP adalah rasio jumlah siswa SMP terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APK SMP Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.6.



Tabel 4.6
Angka partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Buleleng tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	74,57	71,91	73,24			97,48
Seririt	86,94	72,90	79,92			99,51
Busungbiu	103,90	92,83	98,37			131,79
Banjar	109,17	106,96	108,07			125,74
Sukasada	67,15	63,86	65,51			78,12
Buleleng	120,96	109,47	115,21			115,08
Sawan	96,55	85,96	91,25			103,70
Kubutambahan	101,50	101,48	101,49			111,04
Tejakula	96,66	94,95	95,80			105,98
Kab. Buleleng	95,27	88,93	92,10			106,48

Sumber: Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari tabel 4.6 pada tahun 2016 APK SMP Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kesenjangan gender dengan dominasi laki-laki, APK SMP laki-laki lebih tinggi dari APK SMP perempuan.

Tahun 2018 tidak tersedia data terpilah APK SMP. Hanya tersedia data APK SMP gabungan laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan stakeholder terkait tidak memilah APK SMP berdasarkan jenis kelamin.

4.2.3 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas adalah rasio jumlah siswa SMA terhadap penduduk kelompok usia 15-17 tahun. APK SMA Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Buleleng tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	28,50	27,16	27,83			
Seririt	36,72	33,73	35,22			
Busungbiu	58,17	45,11	51,64			
Banjar	43,83	36,64	40,23			
Sukasada	18,97	16,77	17,87			



Buleleng	82,11	77,69	79,90			
Sawan	29,16	22,77	25,96			
Kubutambahan	48,60	47,83	48,21			
Tejakula	40,58	36,18	38,38			
Kab. Buleleng	42,96	38,21	40,58			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari tabel 4.7, pada tahun 2016 APK SMA Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kesenjangan gender dengan dominasi laki-laki. APK SMA laki-laki lebih tinggi dari APK SMA perempuan.

Tahun 2018 tidak tersedia data APK SMA di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMA bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APK SMA per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMA kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMA di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMA merupakan urusan Pemerintah Provinsi.

4.2.4 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Kejuruan

Angka Partisipasi Kasar SMK Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Kejuruan
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	31,66	25,71	28,69			
Seririt	47,55	40,70	44,12			
Busungbiu	14,18	9,08	11,63			
Banjar	0,00	0,00	0,00			
Sukasada	31,60	26,19	28,89			
Bulleng	103,85	71,62	87,74			
Sawan	27,01	21,63	24,32			
Kubutambahan	14,59	44,57	29,58			
Tejakula	30,37	24,84	27,60			
Kab. Buleleng	33,42	29,37	31,40			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



Data tabel 4.8 menunjukkan pada tahun 2016 APK SMK Kabupaten Buleleng memperlihatkan adanya kesenjangan gender dengan dominasi laki-laki. APK SMK laki-laki lebih tinggi dari APK SMK perempuan.

Tahun 2018 tidak tersedia data APK SMK di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APK SMK per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMK kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMK di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMK merupakan urusan Pemerintah Provinsi.

4.3 Jumlah Siswa

4.3.1 Jumlah Siswa Sekolah Dasar

Jumlah siswa Sekolah Dasar disajikan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	4.082	3.834	7.916	4.118	3.876	7.996
Seririt	3.743	3.514	7.257	3.665	3.528	7.193
Busungbiu	2.193	2.025	4.218	2.195	2.033	4.228
Banjar	3.871	3.632	7.503	3.973	3.636	7.609
Sukasada	4.158	3.779	7.937	4.273	3.824	8.097
Buleleng	7.490	6.807	14.306	7.380	6.759	14.139
Sawan	3.462	3.234	6.696	3.508	3.258	6.766
Kubutambahan	3.353	3.226	6.579	3.293	3.211	6.504
Tejakula	3.149	2.961	6.110	3.259	3.053	6.312
Kab. Buleleng	35.501	33.012	68.522	35.622	33.182	68.844

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Tabel 4.9 menunjukkan ada kesenjangan gender pada siswa Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng tahun 2016 dan tahun 2018. Jumlah siswa laki-laki lebih besar dari jumlah siswa perempuan. Dominasi siswa laki-laki di Sekolah Dasar terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng.

4.3.2 Jumlah Siswa SMP

Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama disajikan pada tabel 4.10



Tabel 4.10
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2017

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	1.717	1.648	3.365	1.769	1.626	3.394
Seririt	1.720	1.495	3.215	1.636	1.557	3.195
Busungbiu	1.176	1.063	2.238	1.076	972	2.046
Banjar	2.169	2.167	4.336	1.964	1.921	3.885
Sukasada	1.422	1.365	2.780	1.421	1.376	2.797
Buleleng	4.552	4.162	8.714	4.298	3.946	8.246
Sawan	1.603	1.466	3.069	1.549	1.414	2.963
Kubutambahan	1.589	1.550	3.139	1.617	1.514	3.131
Tejakula	1.485	1.423	2.908	1.430	1.409	2.839
Jumlah	17.432	16.339	33.771	16.762	15.736	32.498

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Tabel 4.10 menampilkan kesenjangan gender, walau tidak menonjol, pada siswa SMP di Kabupaten Buleleng tahun 2016 dan 2018. Siswa Laki-laki jumlahnya lebih banyak ketimbang siswa perempuan. Jika dilihat per kecamatan kesenjangan gender, walau tidak menonjol, terjadi di semua kecamatan.

4.3.3 Jumlah Siswa SMA

Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Buleleng tahun 2016 dan 2018 disajikan pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	614	580	1.648	607	541	1.148
Seririt	671	639	1.310	705	659	1.364
Busungbiu	607	477	1.048	607	538	1.145
Banjar	804	685	1.489	1.040	857	1.897
Sukasada	371	331	702	464	411	875
Buleleng	2.851	2.726	5.577	2.622	2.719	5.341
Sawan	448	359	807	479	423	902
Kubutambahan	703	675	1.378	741	732	1.473
Tejakula	576	501	1.077	616	554	1.170



Kab. Buleleng	7.645	6.973	14.618	7.881	7.434	15.315
---------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.11 memperlihatkan pada tahun 2016 dan 2018 ada kesenjangan gender pada siswa SMA Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki, walau tidak menonjol. Siswa laki-laki jumlahnya lebih besar ketimbang siswa perempuan. Jika dilihat per kecamatan, kesenjangan gender juga terjadi di semua kecamatan, kecuali keadaan tahun 2018 di kecamatan Buleleng jumlah siswa perempuan lebih banyak ketimbang jumlah siswa laki-laki.

4.3.4 Jumlah Siswa SMK

Jumlah siswa SMK di Kabupaten Buleleng tahun 2016 dan 2018 disajikan pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Kabupaten Buleleng tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	681	549	1.230	649	886	1.535
Seririt	869	771	1.640	966	1.138	1.787
Busungbiu	148	96	244	245	154	399
Banjar	0	0	0	0	0	0
Sukasada	618	517	1.135	788	688	1.476
Buleleng	3.611	2.516	6.127	3.662	2.591	6.253
Sawan	415	341	756	528	448	976
Kubutambahan	211	629	840	368	846	1.214
Tejakula	431	344	775	418	381	799
Jumlah	6.984	5.763	12.747	7.824	6.815	14.439

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.12 menunjukkan pada tahun 2016 dan 2018 ada kesenjangan gender pada siswa SMK Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki, walau tidak menonjol. Jumlah siswa laki-laki lebih banyak ketimbang jumlah siswa perempuan. Jika dilihat per kecamatan, dominasi siswa laki-laki terjadi juga di semua kecamatan, kecuali Banjar tidak ada SMK dan Kubutambahan tahun 2018 ada dominasi perempuan.

4.4 Siswa Putus Sekolah

4.4.1 Siswa Putus Sekolah Sekolah Dasar

Siswa putus sekolah Sekolah Dasar disajikan pada tabel 4.13.



Tabel 4.13
Siswa Putus Sekolah Sekolah Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	0	0	0			
Seririt	1	0	1			
Busungbiu	0	0	0			
Banjar	0	0	0			
Sukasada	0	2	2			
Buleleng	0	0	0			
Sawan	0	1	1			
Kubutambahan	5	2	7			
Tejakula	0	0	0			
Kab. Buleleng	6	5	11			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.13 memperlihatkan pada tahun 2016 ada 11 siswa SD Kabupaten Buleleng putus sekolah. Siswa laki-laki lebih banyak putus sekolah SD (6 siswa) ketimbang siswa perempuan (5 siswa). Pada tahun 2018 tidak ada data siswa SD putus sekolah.

4.4.2 Siswa Putus Sekolah SMP

Siswa putus sekolah Sekolah Menengah Pertama disajikan pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Siswa Putus Sekolah SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	12	9	21	9	23	32
Seririt	1	2	3	26	47	73
Busungbiu	3	2	5	4	7	11
Banjar	28	10	38	19	21	40
Sukasada	6	3	9	7	7	14
Buleleng	0	1	1	47	34	81
Sawan	9	8	17	16	14	30
Kubutambahan	2	3	5	18	16	34
Tejakula	64	45	109	31	25	56
Kab. Buleleng	125	83	208	177	194	371

Sumber: Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng



Tabel 4.14 menampilkan pada tahun 2016 ada 208 siswa SMP putus sekolah di Kabupaten Buleleng. Jumlah terbanyak 109 siswa putus sekolah di Kecamatan Tejakula. Jumlah paling kecil 1 siswa putus sekolah di Kecamatan Buleleng. Dari 208 siswa SMP putus sekolah di Kabupaten Buleleng didominasi oleh siswa laki-laki 125 siswa sisanya 83 perempuan.

Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah siswa SMP Kabupaten Buleleng putus sekolah menjadi 371 siswa didominasi oleh perempuan 194 sisanya siswa laki-laki. Jika dilihat per kecamatan jumlah siswa putus sekolah terbanyak ada di Kecamatan Buleleng 81 siswa dan terkecil di Kecamatan Busungbiu 11 siswa SMP putus sekolah.

4.4.3 Siswa Putus Sekolah SMA

Tabel 4.15
Siswa Putus Sekolah SMA Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	0	0	0			
Seririt	7	6	13			
Busungbiu	0	0	0			
Banjar	3	4	7			
Sukasada	0	0	0			
Buleleng	2	0	2			
Sawan	0	0	0			
Kubutambahan	0	0	0			
Tejakula	3	2	5			
Kab. Buleleng	15	12	27			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.15 menampilkan pada tahun 2016 ada 27 siswa SMA Kabupaten Buleleng putus sekolah, didominasi oleh siswa laki-laki 15 siswa sisanya perempuan. Jika dilihat per kecamatan jumlah terbanyak siswa SMA putus sekolah di Kecamatan Seririt 13 siswa putus sekolah.

4.4.4 Siswa Putus Sekolah SMK

Siswa putus sekolah Sekolah Menengah Kejuruan disajikan pada tabel 4.16.

Tabel 4.16
Siswa Putus Sekolah SMK Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	0	2	2			



Seririt	0	1	1			
Busungbiu	0	1	1			
Banjar	0	0	0			
Sukasada	0	0	0			
Buleleng	5	5	10			
Sawan	1	2	3			
Kubutambahan	4	6	10			
Tejakula	2	1	3			
Kab. Buleleng	12	18	30			

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.16 menampilkan pada tahun 2016 ada 30 siswa SMK Kabupaten Buleleng putus sekolah, didominasi oleh siswa perempuan 18 siswa sisanya siswa laki-laki. Jumlah terbanyak siswa putus sekolah di Kecamatan Buleleng dan Kubutambahan masing-masing 10 siswa. Tahun 2018 tidak ada data siswa SMK Kabupaten Buleleng putus sekolah.

4.5 Jumlah Guru

4.5.1 Jumlah Guru Sekolah Dasar

Jumlah guru Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.17.

Tabel 4.17
Jumlah Guru Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	208	193	401	151	181	332
Seririt	238	241	479	182	225	407
Busungbiu	210	184	374	173	156	329
Banjar	273	236	509	219	240	459
Sukasada	299	262	561	233	257	490
Buleleng	297	599	896	235	534	769
Sawan	209	246	456	167	233	390
Kubutambahan	226	154	410	186	184	370
Tejakula	181	191	372	157	166	323
Kab. Buleleng	2.141	2.318	4.457	1.703	2.166	3.869

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.17 menampilkan tahun 2016 dan 2018 ada ketimpangan gender pada guru SD di Kabupaten Buleleng dengan dominasi guru perempuan. Hal ini cocok dengan stereotip bahwa perempuan kalau menjadi guru cocok menjadi guru SD.



4.5.2 Jumlah Guru SMP

Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.18.

Tabel 4.18
Jumlah Guru SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	104	70	174	97	86	183
Seririt	175	89	241	79	92	171
Busungbiu	87	33	120	74	36	110
Banjar	127	104	231	118	100	218
Sukasada	92	97	189	77	98	175
Buleleng	219	314	533	190	308	498
Sawan	108	88	196	96	87	183
Kubutambahan	114	77	191	103	76	179
Tejakula	83	53	136	85	59	144
Kab. Buleleng	1.023	922	1.945	919	942	1.861

Sumber: Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.18 menunjukkan tahun 2016 ada kesenjangan gender pada guru SMP di Kabupaten Buleleng, walau tidak mencolok, dengan dominasi guru laki-laki. Namun tahun 2018 terjadi pergeseran menjadi dominasi perempuan.

4.5.3 Jumlah Guru SMA

Jumlah guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.19.

Tabel 4.19
Jumlah Guru SMA Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	39	44	83	34	44	78
Seririt	55	26	81	49	31	80
Busungbiu	49	31	80	47	32	79
Banjar	62	28	90	71	37	108
Sukasada	38	29	67	39	30	69
Bulleng	202	186	368	172	190	362
Sawan	42	27	69	27	30	57
Kubutambahan	61	43	104	56	45	101
Tejakula	48	29	77	44	34	77



Kab. Buleleng	596	443	1.039	539	469	1.008
---------------	-----	-----	-------	-----	-----	-------

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.19 menampilkan tahun 2016 dan 2018 ada kesenjangan gender pada guru SMA di Kabupaten Buleleng dengan dpminasi laki-laki.

4.5.4 Jumlah Guru SMK

Jumlah guru Sekolah Menengha kejuruan di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.20.

Tabel 4.20
Jumlah Guru SMK Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	38	25	63	38	40	78
Seririt	54	67	121	45	69	114
Busungbiu	11	11	22	14	8	22
Banjar	0	0	0	0	0	0
Sukasada	58	49	107	61	66	127
Buleleng	223	238	461	201	235	436
Sawan	22	26	48	27	35	62
Kubutambahan	42	31	73	41	36	77
Tejakula	24	23	47	27	24	51
Kab. Buleleng	472	470	942	454	513	967

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.20 menampilkan tahun 2016 jumlah guru SMK di Kabupaten Buleleng hampir berimbang dengan sedikit lebih banyak guru laki-laki. Namun, tahun 2018 terjadi pergeseran menjadi dominasi guru perempuan.

Dari data jumlah guru SD sampai dengan guru SMA tampak bahwa pada lembaga pendidikan yang tingkatnya lebih rendah, guru perempuan mendominasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan didominasi oleh guru laki-laki. Untuk lembaga pendidikan SMK terjadi dominasi guru perempuan karena jenis lembaga pendidikannya seperti misalnya jurusan tata boga, tata busana, tata rias, yang ada stereotip untuk perempuan, sehingga lebih banyak membutuhkan guru perempuan.

4.6 Guru Bersertifikat Pendidik

Guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.21.



Tabel 4.21
Guru Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Bersertifikat Pendidik Tahun 2016-2018

Guru Pada Tingkat Pendidikan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Guru SD	1.085	1.009	2.094	1.024	994	2.018
Guru SMP	669	449	1.118	585	431	1.016
Guru SMA	422	246	668			
Guru SMK	221	158	379			
Kab. Buleleng	2.397	1.862	4.259	1.582	1.425	3.007

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.21 menampilkan tahun 2016 ada ketimpangan gender pada guru bersertifikat pendidik pada semua tingkat pendidikan dengan dominasi guru laki-laki. Tahun 2018 juga ada kesenjangan gender pada guru bersertifikat pendidik pada tingkat pendidikan SD dan SMP dengan dominasi guru laki-laki. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng tidak tersedia data guru bersertifikat pendidik. Hal ini terkait dengan pengelolaan SMA dan SMK ada di Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat data guru bersertifikat pendidik per kabupaten.

Dari data gender terpilah di bidang pendidikan yang disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada kesenjangan gender pada jumlah siswa, APM, dan APK pada semua tingkat pendidikan di Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki.
2. Dilihat dari jumlah guru, pada tingkat pendidikan SD didominasi oleh guru perempuan, pada tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung didominasi oleh guru laki-laki.
3. Guru bersertifikat pendidik didominasi oleh guru laki-laki.
4. Data gender terpilah menurut jenis kelamin tidak lengkap ketersediaannya.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng tidak cukup dibebankan kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pemberdayaan perempuan saja. Tetapi memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah dan dukungan otoritas yang lebih tinggi, serta partisipasi masyarakat.



BAB V GENDER PADA BIDANG KESEHATAN

Kinerja penyelenggaraan kesehatan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan bersama-sama dengan pendidikan dan kegiatan ekonomi. Kinerja penyelenggaraan kesehatan yang dipakai ukuran dalam pembentukan IPM adalah usia harapan hidup. Selain sebagai salah satu komponen pembentuk IPM, kinerja penyelenggaraan kesehatan juga sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks pemberdayaan gender dan Indeks Pembangunan Gender. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan haruslah sensitif gender dalam artian perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, control, dan manfaat dari kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Untuk mengetahui apakah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sudah sensitif gender atau tidak, maka diperlukan data terpilah terkait dengan kinerja penyelenggaraan kesehatan sebagai berikut.

5.1 Gender Pada Pemberian ASI Bayi

Jumlah bayi yang mendapat ASI eksklusif di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Bayi Usia 0-6 Bulan			Jumlah Bayi Asi Eksklusif Usia 0-6 Bulan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	341	283	624	265 (77,71 %)	212 (74,91%)	477 (76,44%)
Seririt	627	547	1.174	350 (55,82%)	273 (49,90%)	623 (53,06%)
Busungbiu	123	111	234	83	88	171



				67,47%)	(79,27%)	(73,07%)
Banjar	331	318	649	227 (68,58%)	224 (70,44%)	451 (69,49%)
Sukasada	385	341	726	291 (75,58%)	256 (75,07%)	547 (75,34%)
Buleleng	255	286	541	180 (70,58%)	205 (71,67%)	385 (71,16%)
Sawan	235	223	458	188 (80,00%)	173 (77,57%)	361 (78,82%)
Kubutambahan	307	314	621	226 (73,61%)	222 (70,70%)	448 (72,14%)
Tejakula	187	166	353	120 (64,17%)	111 (66,86%)	231 (65,43%)
Kab. Buleleng	2.791	2.588	5.379	1.928 (69,07%)	1.792 (69,24%)	3.720 (69,15%)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Tabel 5.1 menampilkan jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Kabupaten Buleleng didominasi oleh bayi laki-laki. Namun, dilihat dari persentase lebih tinggi bayi perempuan yang mendapatkan ASI eksklusif.

5.2 Gender Pada Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan kesehatan Balita di Kabupaten Buleleng tahun 2018 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Balita			Pelayanan Kesehatan			Persentase		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerokgak	3.333	3.160	6.493	3.605	3.528	7.133	108,2	111,6	109,8
Seririt	2.813	2.786	5.599	2.582	2.489	5.071	91,8	89,3	90,6
Busungbiu	1.599	1.548	3.147	1.492	1.326	2.818	93,3	85,6	89,5
Banjar	2.793	2.790	5.583	3.208	3.200	6.408	114,8	114,7	114,8
Sukasada	3.040	2.930	5.970	3.783	4.168	7.951	124,4	142,2	133,2
Buleleng	5.387	5.200	10.587	4.822	4.875	9.697	89,5	93,7	91,6
Sawan	2.355	2.309	4.664	2.168	2.143	4.311	92,1	92,8	92,4
Kubutambahan	2.219	2.069	4.288	2.178	2.141	4.319	98,2	103,5	100,7
Tejakula	2.157	2.011	4.168	1.907	1.751	3.658	88,4	87,1	87,8
Kab. Buleleng	25.695	24.802	50.497	25.723	25.603	51.326	100,1	103,2	101,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng (diolah)

Tabel di atas menunjukkan pada tingkat kabupaten ada ketimpangan gender namun tidak signifikan pada jumlah Balita yang mendapat pelayanan kesehatan, dengan dominasi laki-laki.



Tabel 5.3
Jumlah Balita Ditimbang Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Balita			Jumlah Ditimbang			Persentase		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerokgak	3.538	3.405	6.943	2.848	2.715	5.563	80,50	79,74	80,07
Seririt	2.418	2.364	4.782	1.707	1.866	3.573	70,59	78,93	74,72
Busungbiu	1.260	1.165	2.425	1.040	963	2.003	82,54	82,66	82,60
Banjar	2.791	2.677	5.468	2.308	2.236	4.544	82,69	83,53	83,10
Sukasada	3.364	3.236	6.600	2.675	2.502	5.177	79,52	77,32	78,43
Buleleng	4.035	3.985	8.020	3.323	3.270	6.593	82,35	82,05	82,20
Sawan	2.275	2.204	4.479	1.558	1.497	3.055	68,48	67,92	68,20
Kubutambahan	2.481	2.475	4.956	1.655	1.644	3.299	66,70	66,42	66,56
Tejakula	2.046	1.942	3.988	1.402	1.309	2.711	68,52	67,40	67,97
Kab. Buleleng	24.272	23.450	47.722	18.488	17.889	36.377	76,17	76,29	76,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng (diolah)

Tabel 5.3 menunjukkan ada ketimpangan gender pada Balita ditimbang, lebih banyak Balita laki-laki yang ditimbang. Ketimpangan ini tidak signifikan, karena jika dilihat dari persentase, lebih banyak Balita perempuan yang ditimbang.

Tabel 5.4
Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	8	9	10
Gerokgak	667	552	1.219
Seririt	482	508	990
Busungbiu	206	157	363
Banjar	532	536	1.062
Sukasada	640	565	1.205
Buleleng	1.133	1.093	2.226
Sawan	506	491	997
Kubutambahan	477	445	892
Tejakula	458	379	837
Kab. Buleleng	5.101	4.746	9.847

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng (diolah)

Tabel 5.4 menunjukkan ada ketimpangan gender pada jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, lebih banyak bayi laki-laki yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap.



5.3 Peserta Keluarga Berencana

Peserta keluarga Berencana di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.5

Tabel 5.5
Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	8	9	10
Gerokgak	1.593	14.205	15.798
Seririt	1.098	12.516	13.614
Busungbiu	420	5.821	6.241
Banjar	675	12.633	11.956
Sukasada	1.399	11.730	13.129
Buleleng	2.415	19.675	22.072
Sawan	701	8.935	9.636
Kubutambahan	443	10.180	10.623
Tejakula	770	8.509	9.279
Kab. Buleleng	9.528	101.807	111.335

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Tabel 5.5 menunjukkan ada ketimpangan gender pada peserta Keluarga Berencana Aktif, lebih banyak perempuan sebagai peserta Keluarga Berencana.

5.4 Gende Pada Tenaga Medis

Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Buleleng

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	8	9	10
Gerokgak	2	1	3
Seririt	3	1	4
Busungbiu	3	1	4
Banjar	3	4	7
Sukasada	2	1	3
Buleleng	6	6	12
Sawan	1	5	6
Kubutambahan	4	3	7
Tejakula	5	1	6
Sub Jumlah	29	23	52
RSUD	15	13	28



RS Kertha Usada	4	8	12
RS Parama Sidhi	6	2	8
RS Tk IV	11	6	17
RS KDH Bros	6	3	9
RS Santi Graha	1	3	4
RS Pratama Tangguwisia	0	0	0
Sub Jumlah	43	35	78
Jumlah Buleleng	72	58	130

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Tabel 5.6 menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender pada profesi dokter umum di Kabupaten Buleleng, dengan dominasi dokter laki-laki.

Jumlah Dokter Gigi di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Jumlah Dokter Gigi di Kabupaten Buleleng

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	8	9	10
Gerokgak	1	1	2
Seririt	2	2	4
Busungbiu	1	1	2
Banjar	1	2	3
Sukasada	1	2	3
Buleleng	2	3	5
Sawan	1	2	3
Kubutambahan	1	1	2
Tejakula	0	1	1
Sub Jumlah	10	15	25
RSUD	2	2	4
RS Kertha Usada	0	1	1
RS Parama Sidhi	0	1	1
RS Tk IV	2	1	3
RS KDH Bros	0	0	0
RS Santi Graha	0	0	0
RS Pratama Tangguwisia	4	3	7
Sub Jumlah	8	8	16
Jumlah Buleleng	18	23	41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Tabel 5.7 menunjukkan ada ketimpangan gender pada profesi Dokter Gigi, dengan dominasi perempuan.



Dari data gender terpilah di bidang kesehatan seperti yang disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelayanan kesehatan kepada bayi dan Balita di Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik, kesenjangan gender tidak signifikan.
2. Ada ketimpangan gender pada peserta Keluarga Berencana Aktif. Lebih banyak perempuan yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif.
3. Ada ketimpangan gender pada profesi dokter. Dokter Umum didominasi oleh laki-laki dan Dokter Gigi didominasi oleh dokter perempuan.

Kondisi tersebut memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Perempuan perlu diberdayakan agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, termasuk dalam menentukan pilihan kepesertaan Keluarga Berencana Aktif. Perempuan juga perlu diberdayakan dalam mengembangkan potensinya memilih profesi.



BAB VI GENDER PADA BIDANG EKONOMI

Kinerja dari kegiatan pembangunan ekonomi menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Selain sebagai salah satu komponen pembentuk IPM, kinerja dari kegiatan pembangunan ekonomi juga menjadi komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi haruslah sensitive gender dalam artian perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi.

Untuk mengenali apakah penyelenggaraan pembangunan ekonomi sudah sensitif gender atau tidak, maka diperlukan data terpilah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan ekonomi sebagai berikut.

6.1 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Sektor

Mata pencarian penduduk Kabupaten Buleleng menurut sektor ekonomi disajikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Buleleng
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2018

Sektor	2017		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Pertanian	67.163	47.981	115.144
Pertambangan/ Pengegalian	985	-	985
Industri Pengolahan	14.614	30.005	44.619
Listrik, Gas, dan Air	412	-	412
Konstruksi	25.924	1.147	27.071
Perdagangan, RM, Restoran dan perhotelan	39.661	56.737	96.398



Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	9.571	-	9.571
Jasa kemasyarakatan	26.294	31.689	57.983
Jasa Asuransi, Keuangan dan Persewaan	4.345	2.564	6.909
Jumlah	188.989	170.123	359.092

Sumber Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng

Tabel 6.1 menampilkan ada kesenjangan gender dalam mata pencaharian penduduk di Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki. Lebih banyak laki-laki yang memiliki mata pencaharian ketimbang perempuan. Namun, ada sejumlah mata pencaharian yang didominasi oleh perempuan yaitu, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. Ini sejalan dengan adanya pandangan selama ini bahwa laki-laki bertugas mencari nafkah di sektor publik dan perempuan bertugas di sektor domestik mengurus rumah tangga. Kalaupun perempuan bekerja di sektor publik maka ada stereotif pekerjaan yang dipandang cocok untuk perempuan.

6.2 Kepemilikan Usaha

Kegiatan ekonomi di sektor formal yang berkembang di Bali umumnya dan juga di Kabupaten Buleleng adalah kegiatan ekonomi di sektor pariwisata, seperti kegiatan usaha hotel, restoran, dan bar.

Jumlah pemilik Hotel Melati disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Jumlah Pemilik Hotel Melati di Kabupaten Buleleng
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	5	13	18
Seririt	1	1	2
Busungbiu	-	-	-
Banjar	5	9	14
Sukasada	2	2	4
Buleleng	13	19	32
Sawan	1	-	1
Kubutambahan	1	1	2
Tejakula	4	3	7
Jumlah	32	48	80

Sumber: Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng

Tabel 6.2 menampilkan ada kesenjangan gender pada pemilikan Hotel Melati di Kabupaten Buleleng. Pemilik Hotel Melati di Kabupaten Buleleng didominasi oleh perempuan. Dominasi perempuan pada pemilikan Hotel Melati di Kabupaten Buleleng terjadi karena terkait dengan peraturan Aparatur Sipil Negara Golongan IV tidak boleh memiliki perusahaan, maka kepemilikan usaha diatasnamakan istrinya.



Jumlah pemilik Restoran disajikan pada tabel 6.3

Tabel 6.3
Jumlah Pemilik Restoran di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	11	2	13
Seririt	3	1	4
Busungbiu	1	-	1
Banjar	14	1	15
Sukasada	6	-	6
Buleleng	26	10	36
Sawan	-	-	-
Kubutambahan	-	-	-
Tejakula	4	2	6
Jumlah	65	16	81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Tabel 6.3 menampilkan ada kesenjangan gender pada pemilikan restoran di Kabupaten Buleleng. Pemilikan Restoran didominasi oleh laki-laki.

Jumlah pemilik Bar di Kabupaten Buleleng tahun 2018 disajikan pada tabel 6.4.

Tabel 6.4
Jumlah Pemilik Bar di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kecamatan	2018		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	6	1	7
Seririt	1	-	1
Busungbiu	-	-	-
Banjar	2	-	2
Sukasada	1	-	1
Buleleng	13	5	18
Sawan	-	-	-
Kubutambahan	-	-	-
Tejakula	1	1	2
Jumlah	24	7	31

Sumber: Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng



Tabel 6.4 menunjukkan ada krsenjangan gender dalam pemilikan Bar di Kabupaten Buleleng. Pemilika Bar didominasi oleh laki-laki.

6.3 Tenaga Kerja Indonesia

Salah satu kegiatan ekonomi yang menonjol bagi penduduk Bali pada umumnya dan termasuk juga penduduk Kabupaten Buleleng karena adanya pengaruh pariwisata adalah aktivitas sebagai tenaga kerja di luar negeri berkaitan dengan pariwisata yaitu sebagai tenaga kerja di kapal pesiar, tenaga kerja di restoran, tenaga kerja di hotel dan SPA. Tenaga kerja Indonesia Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri disajikan pada tabel 6.5.

Tabel 6.5
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng di Luar Negeri
Menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018

No	Negara Tujuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Laki	Perempuan	Jumlah	Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Italia	123	7	130	117	10	127
2	Turki	2	213	215	3	269	272
3	New Zeland	70	12	82	28	14	42
4	India	0	16	16	0	25	25
5	Maldives	4	42	46	0	24	24
6	UAE	15	26	41	10	8	18
7	Rusia	1	24	25	0	9	9
8	Polandia	0	13	13	0	10	10
9	Sri Lanka	0	6	6	0	5	5
10	China	6	1	7	1	3	4
11	Macao	1	0	1	2	0	2
12	Qatar	7	14	21	2	4	6
13	Cyprus	2	5	7	0	7	7
14	Malaysia	1	6	7	5	4	9
15	USA	50	3	53	3	0	3
16	Bulgaria	0	0	0	0	0	0
17	Bahrain	0	1	1	1	2	3
18	Kepulauan Palau	0	2	2	0	0	0
19	Kongo	0	0	0	1	0	1
20	Nigeria	0	4	4	0	1	1
21	Oman	1	0	1	0	0	0
22	Uzbekistan	0	0	0	0	0	0
23	Yunani	10	0	10	1	1	2
24	Hungaria	0	2	2	0	0	0
25	Irak	0	0	0	0	0	0
26	Jerman	33	1	34	0	0	0
27	Kazakstan	0	2	2	0	2	2



No	Negara Tujuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Laki	Perempuan	Jumlah	Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Mauritius	0	2	2	0	0	0
29	Mesir	1	4	5	0	0	0
30	Moldova	0	0	0	2	2	4
31	Ukraina	0	0	0	0	0	0
32	Cuba	11	1	12	3	0	3
33	Brazil	28	3	31	25	1	26
34	Japan	29	1	30	9	0	9
35	Morocco	2	3	5	0	2	2
36	Korea	1	0	1	0	0	0
37	South Africa	30	0	30	8	0	8
38	Spanyol	16	2	18	7	0	7
39	Jordania	0	3	3	0	0	0
40	Guinea	0	1	1	0	0	0
41	Hongkong	1	0	1	0	0	0
42	Rumania	0	3	3	0	1	1
43	Saudi Arabia	2	0	2	0	3	3
44	Serbia M	1	4	5	0	0	0
45	Tanzania	0	3	3	0	0	0
46	Australia	3	1	4	0	0	0
47	Kroasia	0	1	1	0	0	0
48	Czech Republic	2	0	2	3	0	3
49	Denmark	26	0	26	0	0	0
50	Prancis	20	2	22	0	0	0
51	Kenya	0	1	1	0	0	0
52	Malta	7	1	8	2	0	2
53	Belanda	1	1	2	2	0	2
54	Panama	1	0	1	0	0	0
55	Portugal	5	0	5	0	0	0
56	Seychelles	1	1	2	0	0	0
57	Brunei	1	1	2	0	0	0
58	Suriname	1	0	1	0	0	0
59	Kuwait	9	3	12	5	2	7
60	Namibia	3	0	3	0	0	0
61	Nevis Island	1	0	1	0	0	0
62	Singapura	0	1	1	0	0	0
63	Kep. Solomon	0	1	1	0	1	1
64	Lithuania	1	0	1	0	0	0
65	Dominica	0	0	0	8	1	9
66	South Korea	0	0	0	1	0	1
67	Albania	0	0	0	0	1	1
68	Belarus	0	0	0	0	1	1
69	georgia	0	0	0	0	1	1



No	Negara Tujuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Laki	Perempuan	Jumlah	Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah	530	444	947	249	414	663

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Dari data gender terpilah bidang ekonomi di Kabupaten Buleleng yang disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada kesenjangan gender pada mata pencaharian dengan dominasi laki-laki. Ada juga stereotip mata pencaharian yang dipandang cocok untuk perempuan.
2. Ada kesenjangan gender pada pemilikan asset produktif dengan dominasi laki-laki. Walaupun perempuan sebagai pemilik asset produktif, itu terjadi atas pemberian laki-laki.
3. Ada pergeseran sebagai tenaga kerja ke luar negeri dari dominasi laki-laki tahun 2017 menjadi dominasi perempuan tahun 2018.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender agar perempuan bisa mandiri memilih mata pencaharian, memiliki asset produktif tanpa tergantung pada pemberian laki-laki.



BAB VII GENDER PADA BIDANG PEMERINTAHAN

Bidang pemerintahan yang mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam pembangunan. Sebelum keterlibatan masyarakat sipil yang semakin besar dalam pembangunan, pemerintah dapat dikatakan merupakan pelaku utama pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan hasil pembangunan. Sedemikian pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan, maka personel pemerintah haruslah mewakili semua gender agar setiap pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan responsif gender. Berikut disajikan data terpilah personel pemerintah di Kabupaten Buleleng.

7.1 Gender Pada Legislatif dan Penyelenggara Pemilu

Tabel 7.1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Buleleng
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai Politik	2014-2019			No	Partai Politik	2019-2024		
		L	P	Jumlah			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDIP	13	2	15	1	PDIP	14	4	18
2	Golkar	7	0	7	2	Golkar	7	0	7
3	Gerindra	5	1	6	3	Gerindra	4	1	5
4	Demokrat	5	1	6	4	Nasdem	3	2	5
5	Hanura	6	0	6	5	Hanura	5	0	5
6	Nasdem	2	2	4	7	Demokrat	2	1	3
7	PPP	1	0	1	8	PKB	1	0	1
					9	Perindo	1	0	1
	Jumlah	39	6	45		Jumlah	37	8	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



Tabel 7.1 menunjukkan adanya ketimpangan gender pada anggota DPRD Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki. Walaupun ada peningkatan jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten Buleleng dari 6 perempuan pada periode 2014-2019 menjadi 8 perempuan pada periode 2019-2024, namun keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Buleleng tidak mencapai target 30% yang diharapkan.

Tabel 7.2
Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Buleleng
Menurut Jenis Kelamin

No	Penyelenggara Pemilu	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Komisi Pemilihan Umum	5	0	5
2	Badan Pengawas Pemilu	5	0	5
	Jumlah	10	10	

Sumber: Sekretariat KPU dan Bawaslu Kabupaten Buleleng

Tabel 7.2 menampilkan ada ketimpangan gender pada komisioner penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki.

7.2 Gener Pada Aparatur Sipil Negara

Tabel 7.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2016	5.707	4.205	9.912
2	Tahun 2017	4.680	3.683	8.363
3	Tahun 2018	4.381	3.562	7.943

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng

Tabel 7.3 menunjukkan ada kesenjangan gender pada ASN Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan.



Tabel 7.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng
Menurut Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	II.a	1	0	1
2	II.b	31	5	36
3	III.a	44	14	58
4	III.b	98	27	125
5	IV.a	348	185	533
6	IV.b	76	42	118
7	V.b	22	9	31
	Jumlah 2018	620	282	902
	Tahun 2017	639	268	907
	Tahun 2016	603	234	837

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng

Tabel 7.4 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN Pemangku Jabatan di Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki.

7.3 Gender Pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng

Tabel 7.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
Menurut Jenis Kelamin tahun 2018.

No	Jenis Hukuman	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng	182	180	362
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	50	22	72
3	Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng	17	5	22
4	Kejaksaan Negeri Singaraja	34	9	43
5	Pengadilan Negeri Singaraja	45	23	68
6	KPP Pratama Singaraja	58	28	86
7	KPKNL Singaraja	22	11	33
	Jumlah	408	278	686

Sumber: Instansi Masing-Masing

Tabel 7.5 menampilkan ada kesenjangan gender pada ASN Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan.



Tabel 7.6
Jumlah Anggota TNI AD Kodim 1609 Buleleng Menurut Pangkat Militer, Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Pangkat Tertinggi					Jumlah
		L	P	Perwira Tinggi	Perwira Menengah	Perwira Pertama	Bintara	Tamtama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasca sarjana	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sarjana	4	0	0	1	1	2	0	4
3	Diploma	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SMA	215	0	0	1	16	177	21	215
5	SMP	72	0	0	0	0	64	8	72
6	SD	2	0	0	0	0	2	0	2
	Jumlah	293	0	0	2	17	245	29	293

Sumber: Komando Distrik Militer 1609/ Buleleng

Tabel 7.6 menunjukkan ada kesenjangan gender pada anggota TNI AD Kodim 1609 Buleleng. Seluruh anggota TNI AD Kodim 1609 Buleleng adalah laki-laki.

Tabel 7.7
Jumlah Anggota Kepolisian Resort Buleleng Menurut Pangkat Kepolisian, Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Pangkat Tertinggi					Jumlah
		L	P	Perwira Tinggi	Perwira Menengah	Perwira Pertama	Bintara	Tamtama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasca sarjana	7	0	0	4	1	2	0	0
2	Sarjana	182	8	0	6	42	142	0	190
3	Diploma	2	0	0	0	0	2	0	2
4	SMA	978	17	0	0	97	898	0	995
5	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.169	25	0	10	140	1.044	0	1.194

Sumber:Kepolisian Resort Buleleng

Tabel 7.7 menunjukkan ada kesenjangan gender pada anggota Kepolisian Resort Buleleng. Jumlah polisi laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah polisi wanita.

Dari data gender terpilah pada bidang pemerintahan yang disajikan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.



1. Ada kesenjangan gender pada legislatif dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng. Jumlah anggota DPRD laki-laki di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah anggota DPRD perempuan. Pada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng kesenjangan gender mutlak. Seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Buleleng adalah laki-laki.
2. Ada kesenjangan gender pada ASN di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan. Jumlah ASN yang memangku jabatan struktural didominasi oleh laki-laki, melebihi proporsi jumlah ASN laki-laki dan perempuan.
3. Ada kesenjangan gender pada ASN Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan.
4. Ada kesenjangan gender pada anggota TNI AD di Kabupaten Buleleng. Seluruh anggota TNI AD di Kodim 1609 Buleleng adalah laki-laki.
5. Ada kesenjangan gender pada anggota kepolisian Resort Buleleng. Jumlah Polisi laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah Polisi Wanita.

Keadaan itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender, agar perempuan mampu aktif berkiprah di bidang pemerintahan, dengan tidak menyalahi kodrat sebagai perempuan.



BAB VIII ISU-ISU GENDER LAINNYA

Selain masalah gender yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa isu gender yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

8.1 Korban dan Pelaku Kekerasan

Data tahun 2016 menunjukkan korban kekerasan lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Ada 43 perempuan korban kekerasan dan 5 laki-laki yang menjadi korban. Pelaku kekerasan 45 laki-laki.

8.2 Gelandangan dan Pengemis

Data tahun 2015 menunjukkan gegendang didominasi oleh perempuan (43) dan laki-laki (26).

8.3 Penduduk Lanjut Usia

Data tahun 2016 menunjukkan ada ketimpangan gender penduduk lanjut usia. Lebih banyak perempuan penduduk lanjut usia (43.972). Penduduk lanjut usia laki-laki sebanyak 40.419.

8.4 Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Sensitif Gender

Infrastruktur dan Sarana-Prasarana di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya sensitif gender. Infrastruktur di jalan, terminal, taman belum menyediakan fasilitas untuk disabilitas yang



menggunakan kursi roda. Beberapa perkantoran yang dibangun baru sudah ada yang menyediakan jalur masuk kantor depan bagi yang menggunakan kursi roda. Ini contoh yang bagus infrastruktur yang sensitif gender. Sarana-Prasarana pelayanan publik belum sepenuhnya sensitif gender. Misalnya meja belajar di sekolah masih sama desainnya untuk laki-laki dan perempuan, meja belajar sensitif gender untuk perempuan perlu desain tertutup di bawah meja agar tempat duduk dan kaki murid perempuan tidak nampak dari depan. Demikian pula sarana-prasarana di perkantoran belum sensitif gender. Kalau kantor menyediakan ruangan khusus bagi perokok, mestinya juga bisa menyediakan ruangan khusus bagi pegawai/ pengunjung perempuan yang menyusui bayi.

8.5 Data Gender Terpilah Menurut Jenis Kelamin

Belum semua OPD menyajikan data gender terpilah. Walaupun sudah menyediakan data gender terpilah, namun belum semua data gender disajikan terpilah. Keadaan ini menjadi hambatan dalam melakukan analisis gender.

8.6 Regulasi Tentang Pengarusutamaan Gender

Belum ada regulasi tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng. Regulasi ini penting agar upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng memiliki landasan yuridis yang kuat.



BAB IX PENUTUP

9.1 Simpulan

Profil Gender Data Terpilah Kabupaten Buleleng dipusatkan pada tiga sektor yaitu, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Tiga sektor itu penting karena indikator yang dipakai mengukur keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain tiga sektor itu, Profil gender Data Terpilah ini juga menyajikan data sektor pemerintahan, karena aparatur pemerintah merupakan penyelenggara pembangunan yang dibiayai oleh Negara. Di luar itu disajikan juga isu-isu gender yang belum tercakup pada sektor pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan sektor pemerintah.

Berdasarkan deskripsi profil gender pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintah serta isu-isu gender lainnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Dari data gender terpilah di bidang pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut.
 - a. Ada kesenjangan gender pada jumlah siswa, APM, dan APK pada semua tingkat pendidikan di Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki.
 - b. Dilihat dari jumlah guru, pada tingkat pendidikan SD didominasi oleh guru perempuan, pada tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung didominasi oleh guru laki-laki.
 - c. Guru bersertifikat pendidik didominasi oleh guru laki-laki.
 - d. Data gender terpilah menurut jenis kelamin tidak lengkap ketersediaannya.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng tidak cukup dibebankan kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pemberdayaan perempuan saja. Tetapi memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah dan dukungan otoritas yang lebih tinggi, serta partisipasi masyarakat.



2. Dari data gender terpilah di bidang kesehatan dapat disimpulkan sebagai berikut.
 - a. Pelayanan kesehatan kepada bayi dan Balita di Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik, meski masih ada yang belum memperoleh pelayanan, kesenjangan gender tidak signifikan.
 - b. Ada ketimpangan gender pada peserta Keluarga Berencana Aktif. Lebih banyak perempuan yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif, seolah ada eksploitasi terhadap perempuan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
 - c. Ada ketimpangan gender pada profesi dokter. Dokter Umum didominasi oleh laki-laki dan Dokter Gigi didominasi oleh dokter perempuan.

Kondisi tersebut memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Perempuan perlu diberdayakan agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, termasuk dalam menentukan pilihan kepesertaan Keluarga Berencana Aktif. Perempuan juga perlu diberdayakan dalam mengembangkan potensinya memilih profesi.

3. Dari data gender terpilah bidang ekonomi di Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut.
 - a. Ada kesenjangan gender pada mata pencaharian dengan dominasi laki-laki. Ada juga stereotip mata pencaharian yang dipandang cocok untuk perempuan.
 - b. Ada kesenjangan gender pada pemilikan aset produktif dengan dominasi laki-laki. Walaupun perempuan sebagai pemilik aset produktif, itu terjadi atas pemberian laki-laki.
 - c. Ada pergeseran sebagai tenaga kerja ke luar negeri dari dominasi laki-laki tahun 2017 menjadi dominasi perempuan tahun 2018.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender agar perempuan bisa mandiri memilih mata pencaharian, memiliki aset produktif tanpa tergantung pada pemberian laki-laki.

4. Dari data gender terpilah pada bidang pemerintahan dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
 - a. Ada kesenjangan gender pada legislatif dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng. Jumlah anggota DPRD laki-laki di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah anggota DPRD perempuan. Pada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng kesenjangan gender mutlak. Seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Buleleng adalah laki-laki.
 - b. Ada kesenjangan gender pada ASN di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan. Jumlah ASN yang memegang jabatan struktural didominasi oleh laki-laki, melebihi proporsi jumlah ASN laki-laki dan perempuan.



- c. Ada kesenjangan gender pada ASN Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan.
- d. Ada kesenjangan gender pada anggota TNI AD di Kabupaten Buleleng. Seluruh anggota TNI AD di Kodim 1609 Buleleng adalah laki-laki.
- e. Ada kesenjangan gender pada anggota kepolisian Resort Buleleng. Jumlah Polisi laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah Polisi Wanita.

Keadaan itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender, agar perempuan mampu aktif berkiprah di bidang pemerintahan, dengan tidak menyalahi kodrat sebagai perempuan.

5. Isu gender lainnya yang menonjol, masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; data gender terpilah belum lengkap ketersediaannya; dan belum ada regulasi tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng yang dipakai landasan yuridis dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

9.2 Rekomendasi

Berlandaskan pada sejumlah simpulan di atas, maka direkomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Untuk mengatasi masih adanya persoalan dan kesenjangan gender di sektor pendidikan, maka perlu dibentuk kelompok kerja Pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Selanjutnya mengaktifkan kelompok kerja mulai dari memilah data setiap tahun, menganalisis data terpilah untuk mengetahui ada atau tidaknya persoalan gender dan kesenjangan gender. Berdasarkan hasil analisis dibuat program kegiatan pengarusutamaan gender serta menyediakan anggarannya untuk mengatasi masalah atau kesenjangan gender.
2. Untuk mengatasi masih adanya persoalan dan kesenjangan gender di sektor kesehatan, supaya dibuat kelompok kerja Pengarusutamaan gender di bidang kesehatan. Selanjutnya kelompok kerja yang sudah terbentuk difungsikan dengan memilah data bidang kesehatan. Data terpilah kemudian dianalisis untuk mengetahui persoalan gender. Berdasarkan hasil analisis dibuat program kegiatan serta anggarannya untuk mengatasi masalah gender bidang kesehatan.
3. Untuk mengatasi masih adanya persoalan gender di bidang ekonomi, perlu dibuat kelompok kerja Pengarusutamaan gender di bidang ekonomi. Kelompok kerja yang sudah terbentuk difungsikan mulai dari memilah data di bidang ekonomi. Data terpilah selanjutnya dianalisis untuk mengetahui persoalan gender. Berdasarkan hasil analisis kemudian disusun program kegiatan beserta anggarannya untuk mengatasi persoalan gender di bidang ekonomi.
4. Untuk mengatasi masih adanya persoalan gender di sektor pemerintahan, perlu komitmen melakukan pengarusutamaan gender. Data gender terpilah di bidang pemerintahan sudah lengkap. Kesenjangan gender dengan dominasi laki-laki atas perempuan di semua unsur



pemerintahan sudah jelas nampak. Tinggal disusun strategi dan ditetapkan komitmen untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender.

5. Untuk mengatasi isu-isu gender lainnya diperlukan komitmen mulai dari menyusun program kegiatan, menyediakan anggaran dan melaksanakan program kegiatan secara serius.
6. Perlu juga disiapkan regulasi tentang Pengarusutamaan Gender, penyiapan regulasi ini bisa inisiatif eksekutif melalui OPD yang memiliki Tupoksi Pemberdayaan Perempuan, bisa juga inisiatif legislative.
7. Profil Gender dengan Data Terpilah perlu dibuat setiap tahun secara berkesinambungan agar dapat ditemukenali keberadaan persoalan gender di Kabupaten Buleleng. Ketersediaan data sangat penting sebagai dasar penyusunan program kegiatan serta pengambilan kebijakan dalam pembangunan pada umumnya dan penyusunan program kegiatan serta pengambilan kebijakan Pengarusutamaan Gender pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Irwan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad, Sjamsiah. (1991). Teknik Analisis Gender (TAG). dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang. (1991). *Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI
- Schneiders, A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Rinehart & Winston.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baron, A. R. (Alih bahasa Ratna Juwita). (2000). Psikologi Sosial. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. "Guide to Gender-sensitive Indicators .
- Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay, 2002. *Understanding Gender Responsive Budgets*.
- "Gender, Law, and Policy in ADB Operations: A Tool Kit (2006). Asian Development Bank.
- Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Buleleng, 2017, *Statistik Gender Kabupaten Buleleng*, Singaraja: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, *Harmonisasi Konsep dan Definisi Gender untuk Aplikasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Pusat Kajian Gender Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2007, *Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor.



Raharjo, Yulfita. 1991, "Perbedaan Antara Studi Wanita Dalam Pembangunan Dan Studi Wanita" dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang, *Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI.

Rahmawati, A. 2004, Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya. Skripsi pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI Bandung: Tidak diterbitkan.

Rinusu (Ed), 2007, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Indonesia: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan United National Development Program (UNDP).

Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita serta Penjelasannya.

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kepmendagri No.15/2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.